



MERAYAKAN INDONESIA RAYA

Direktorat Jenderal Kebudayaan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
2016

Merayakan Indonesia Raya



Direktorat Jenderal Kebudayaan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
2016

Prakata

Buklet bertajuk “Merayakan Indonesia Raya” ini disusun untuk memperingati kelahiran lagu kebangsaan *Indonesia Raya* dan menjadi bagian dari buku **Pendampingan Sejarah di Sekolah**. Lagu yang digubah oleh Wage Rudolf Supratman ini diperdengarkan pertama kali pada Kongres Pemuda Kedua, suatu perhelatan besar yang menghasilkan Sumpah Pemuda. Oleh karenanya, buklet ini diawali dengan uraian yang panjang tentang zaman yang membidani kelahiran *Indonesia Raya*, yakni sejarah pergerakan kebangsaan di seputar Sumpah Pemuda.

Selain itu, dalam buklet ini dipaparkan juga riwayat sang pencipta lagu Indonesia Raya. Bagaimana W.R. Supratman mulai menggubah musik, bagaimana ia mulai terjun ke dalam aktivisme kebangsaan, bagaimana lagu *Indonesia Raya* dilarang oleh pemerintah kolonial dan bagaimana hari-hari terakhir sang komponis di tangan aparatus kolonial.

Terakhir, dalam buklet ini juga diuraikan bagaimana lagu *Indonesia Raya* yang semula dinyanyikan tiga stanza kemudian cenderung dipangkas menjadi satu stanza saja, sekalipun Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tetap mengakui adanya tiga stanza tersebut. Dalam hal ini, artikel yang ditulis oleh Gunawan Wiradi dicantumkan menjelang bagian akhir buklet ini, menjelaskan secara benderang proses peralihan tersebut.

Penyusun

Daftar Isi

Sumpah Pemuda dan Momentum Kelahiran <i>Indonesia Raya</i>	6
Riwayat Hidup W.R. Supratman	37
<i>Indonesia Raya</i> Tiga Stanza	46
Lagu Kebangsaan dan Nasionalisme	52
Potongan UU Nomor 24 Tahun 2009	60
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1958	66
Tentang Gita Bahana Nusantara	76

Sumpah Pemuda dan Momentum Kelahiran *Indonesia Raya*

Awal Pergerakan Kebangsaan Indonesia

Pergerakan kebangsaan Indonesia bermula dari tangan para pemuda. Mereka menyalakan api Kebangkitan Nasional melalui penerbitan surat kabar yang menyuarakan kepentingan bangsa Indonesia dan pendirian organisasi-organisasi modern yang punya kesadaran akan pembebasan nasional. Di tangan para pemuda awal abad ke-20, muncullah kesadaran tentang bangsa Indonesia yang mengatasi perbedaan antarsuku-suku Nusantara dan dari merekalah juga bergulir suatu proses yang akan mengantarkan Indonesia menuju kemerdekaannya.

Salah satu penggerak pertama dari keseluruhan proses itu ialah Raden Mas Tirta Adhi Soerjo (1880-1918), sosok pendiri pers nasional yang telah ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional melalui Keppres RI No. 85/TK/2006. Sejak muda, Tirta Adhi Soerjo telah merintis berbagai penerbitan surat kabar. Yang paling terkenal adalah surat kabar *Medan Prijaji* (beredar sejak Januari 1907 sampai Januari 1912). Inilah surat kabar pertama yang dikelola sepenuhnya oleh tenaga pribumi dan menggunakan bahasa Melayu. Inilah juga surat kabar pergerakan pertama yang menjadi model bagi berbagai surat kabar pergerakan sesudahnya (seperti *Sarotomo* dan *Soeloeh Indonesia*).

Sebagai surat kabar pergerakan, *Medan Prijaji* memuat laporan dan liputan yang dituliskan dari sudut pandang rakyat Indonesia. Metode jurnalismenya dikenal sebagai jurnalisme advokasi, yakni suatu cara kerja jurnalistik yang menekankan pada pembelaan pada kaum tertindas yang tengah diliput. Melalui kerja jurnalistik semacam inilah, Tirta Adhi Soerjo mengobarkan semangat anti-kolonial dan menyulut kesadaran berkebangsaan yang mandiri. Generasi muda yang tumbuh melalui bacaan atas surat kabar ini kemudian membawa dalam diri mereka kesadaran tentang ketidakadilan pemerintah kolonial dan situasi keterjajahan bangsa Indonesia

Pada 20 Mei 1908, berdiri organisasi pemuda pertama Boedi Oetomo yang digagas para mahasiswa STOVIA di lapangan pengorganisasian modern, Boedi Oetomo belum sampai pada usaha menuntut kemerdekaan Indonesia. Barulah dengan berdirinya Indische Partij pada 25 Desember 1912 tuntutan kemerdekaan menjadi eksplisit sebagai tujuan partai. Tiga serangkai pendirinya, yakni Douwes Dekker, Tjipto Mangoenkoesoemo dan Soewardi Soerjaningrat tak lama kemudian berurusan dengan polisi kolonial karena mempropagandakan kemerdekaan Indonesia. Kesadaran tentang bertanah air dan berbangsa satu bangkit dari sana.

Maka, dimulailah apa yang disebut sebagai "Zaman Bergerak", yakni era perlawanan rakyat Indonesia yang terorganisasikan secara modern terhadap pemerintahan kolonial, struktur feodal dan pranata kapitalis di Hindia Belanda yang terjadi

antara 1912 dan 1926. Perlawanan ini dikatakan 'terorganisasikan secara modern' karena tak lagi menggunakan pendekatan feodal seperti *pépe* (berjemur) di halaman pembesar lokal memohon kesudiannya untuk menjalankan perubahan situasi, melainkan menggunakan instrumen politik seperti organisasi/perserikatan (*vereniging*) dan pemogokan (*werkstaking*) yang difungsikan secara strategis untuk memaksa pemodal menerima tuntutan gerakan. Berbagai gerakan pekerja dan intelektual muda bergabung dalam aksi-aksi bersama yang menentang tatanan kolonial yang represif.

Pada masa inilah timbul kesadaran baru bahwa tatanan politik kolonial bukanlah nasib yang ditimpakan begitu saja ke bumi manusia, melainkan dapat diubah sewaktu-waktu oleh tangan rakyat Indonesia sendiri. Haji Misbach, seorang aktivis pergerakan masa itu, berbicara tentang "djaman balik boeono" (zaman terjungkir-baliknya dunia). Dalam pidatonya di salah satu pemogokan ia menyatakan: "Tjeritnja ja-itoe di negri Oostenrijk (Austria), dhoeloe djoega di kepalai oleh saorang Radja tetapi sekarang soedah boeono baliknja-itoe di kepalai *Republiek*, mendjadi waktoe itoe banjak sekali ambtenaar-ambtenaar jang di-boenoeh oleh republiek asal bekas ambtenaar kelihatan djalan, teroes potong sadja lehernja, begitoelah seteroesnja. Maka soedara, ajo! ingetlah, bila tanah ini boekan poenjanja siapa-siapa, terang bila poenja kita sendiri. Tida boleh tida, ini tanah temtoe kombali pada kita lagi." (Shiraishi 1997: 263-264)

Kesadaran tentang zaman yang telah berganti rupa

semacam ini terus muncul di kalangan pergerakan kebangsaan Indonesia.

Dalam hiruk-pikuk semangat perubahan inilah lahir gerakan para pemuda yang mengupayakan ikatan komitmen bersama sebagai bangsa.

Kongres Pemuda Pertama

Pada 1925 dilangsungkan rapat-rapat persiapan yang akan mengarah pada terlaksananya Kongres Pemuda Pertama. Para perintisnya tergabung dalam Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia (PPPI) yang berasal dari sekolah-sekolah tinggi di Jakarta dan Bandung. Mereka yang aktif di sana antara lain Soegondo Djojopoespito, Sigit, Abdul Sjukur, Gularso, Sumitro, Samijono, Hendromartono, Subari, Rochjani, S. Djoened Poesponegoro, Kuntjoro, Wilopo, Surjadi, Muhammad Yamin, A.K. Gani dan Aboe Hanifah.

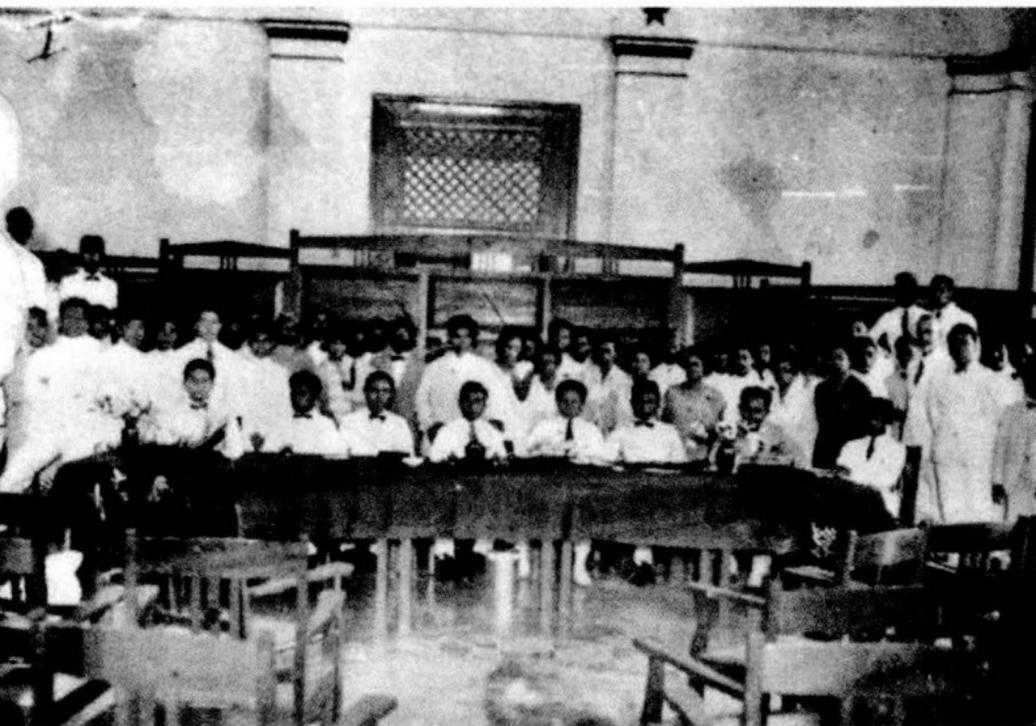
Sebagai angkatan muda yang mengenyam pendidikan model Eropa, mereka antusias mempelajari dan memperdebatkan berbagai revolusi besar dunia, seperti Revolusi Amerika 1776, Revolusi Prancis 1789, Revolusi Cina 1911 dan Revolusi Rusia 1917. Mereka pun mendiskusikan beragam pemikiran politik dunia, mulai dari Plato, Aristoteles, Niccolo Machiavelli, Thomas Hobbes, Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau dan John Stuart Mill (Rachman 2016: 5). Sekalipun menimba pelajaran dari berbagai belahan dunia, cita-cita mereka tentang sebuah forum yang mendeklarasikan persatuan bangsa

Indonesia terinspirasi dari wacana persatuan yang didengungkan oleh Perhimpunan Indonesia (PI).

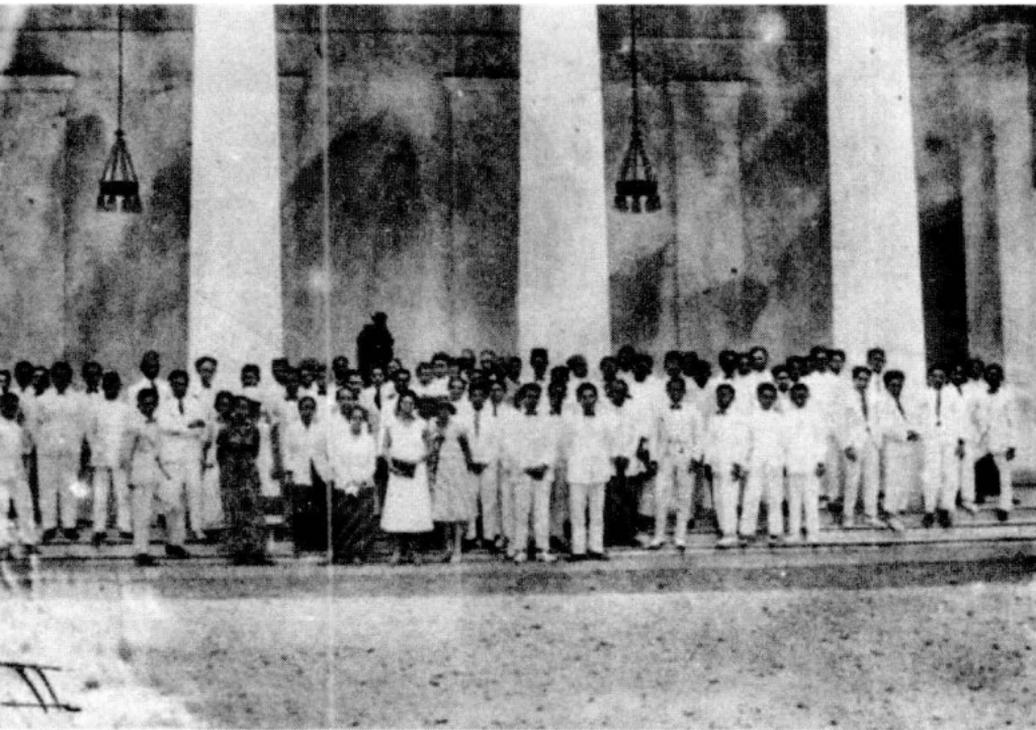
Sebagai wadah para pelajar Indonesia di negeri Belanda, Perhimpunan Indonesia mengalami radikalisasi berkat bergabungnya Tjipto Mangoenkoesoemo dan Soewardi Soerjaningrat pada 1913. Keduanya dibuang ke Belanda akibat aktivitas mereka dalam Indische Partij. Berkat kehadiran keduanya, Perhimpunan Indonesia yang semula hanya menggelar forum silaturahmi dan pesta-pesta kemudian mulai aktif membicarakan kemungkinan persatuan kebangsaan di dalam panji Indonesia merdeka. Pada 1925, diskusi-diskusi mereka tentang kondisi bangsa mengantar mereka pada segugus kesimpulan yang kemudian dikenal sebagai Manifesto Politik 1925:

1. Rakyat Indonesia sewajarnya diperintah oleh pemerintah yang dipilih sendiri oleh mereka.
2. Dalam memperjuangkan pemerintahan sendiri itu tidak diperlukan bantuan dari pihak manapun.
3. Tanpa persatuan yang kokoh dari berbagai unsur rakyat, tujuan perjuangan itu akan sulit dicapai.

Semangat merdeka ini tercermin dalam terbitan mereka. Perhimpunan Indonesia mengeluarkan terbitan rutin berjudul *Indonesia Merdeka* yang melontarkan seruan-seruan nasionalis untuk kemerdekaan Indonesia. Seruan inilah yang ditangkap oleh Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia dan mulai digencarkan di dalam negeri serta diwujudkan dalam bentuk kongres persatuan Indonesia.



Pimpinan organisasi pada Kongres Pemuda I, 2 Mei 1926, diketuai Tabrani. (Sumber: Perpusnas)



Pimpinan dan peserta Kongres Pemuda I di "gedung setan" (kini gedung farmasi) Jalan Budi Utomo-Jakarta, 2 Mei 1926.
[Sumber: Perpunas]

Kongres Pemuda Pertama diselenggarakan di Jakarta antara 30 April dan 2 Mei 1926. Susunan kepanitiaan Kongres ini adalah sebagai berikut: Mohammad Tabrani (Jong Java) selaku ketua, Soemarto (Jong Java) selaku wakil ketua, Djamaluddin Adinegoro (Jong Soematanen Bond) selaku sekretaris, dan Soewarso (Jong Java) selaku bendahara. Anggota: Bahder Djohan (Jong Soematanen Bond), Jan Toule Soulehuwii (Jong Ambon), Paul Pinontoan (Jong Celebes), Achmad Hamami (Sekar Roekoen, Sanoesi Pane (Jong Bataks Bond), Sarbaini (Jong Soematanen Bond).

Tema utama yang ditekankan dalam Kongres ini adalah "penyebaran jiwa kebangsaan Indonesia di kalangan pemuda Indonesia" (*de Nationaal Indonesische geest onder de Indonesische Jeugd*). Kongres ini diselenggarakan dengan cita-cita untuk:

1. Membentuk badan terpusat dari organisasi-organisasi pemuda yang ada.
2. Memajukan gagasan persatuan nasional.
3. Menjalinkan kerjasama lebih erat antar-organisasi pemuda yang bernafaskan persatuan nasional.

Yang hadir dalam Kongres ini adalah perwakilan dari berbagai organisasi pemuda kebangsaan seperti Jong Java, Jong Soematanen Bond, Jong Ambon, Sekar Roekoen, Jong Islamieten Bond, Jong Minahasa, dan Jong Bataks Bond.

Kongres Pemuda Pertama kesulitan menghasilkan keputusan yang tajam karena perasaan kedaerahan masih sangat mewarnai pandangan dari setiap delegasi pemuda. Meski

begitu, sudah ada usaha bersama untuk menggagas cita-cita persatuan Indonesia dan kesadaran bersama tentang perlunya menghilangkan pandangan adat kedaerahan yang kolot dan sempit. Tetapi, perwujudannya dalam bentuk komitmen bersama yang positif belum berhasil dirumuskan secara tegas.

Apa yang terjadi di sana lebih merupakan pertemuan penjajakan tentang berbagai ide terkait persatuan kebangsaan. Muhammad Yamin, misalnya, menyampaikan pidato "Kemungkinan-Kemungkinan Masa Depan Bahasa dan Sastra Indonesia" yang berargumen bahwa bahasa Melayu adalah bahasa yang paling cocok digunakan sebagai bahasa persatuan. Sementara yang lain berpendapat bahasa Jawa lebih tepat digunakan sebagai bahasa persatuan. Sedangkan keseluruhan diskusi itu sendiri dilakukan dalam bahasa Belanda. Kesulitan menyatukan pandangan amat terasa dalam sidang-sidang Kongres Pemuda Pertama. Bahkan pimpinan Kongres, Mohammad Tabrani, berulang-kali mesti memediasi berbagai pendapat yang menjurus pada sentimen kedaerahan agar tidak pecah sebagai konflik terbuka antar-organisasi pemuda.



Jamuan perpisahan di Restoran Insulinde, Jalan Petjenongan, Jakarta, antara panitia dan sebagian para peserta Kongres Pemuda I, 2 Mei 1926. (Sumber: Perpusnas)

Kongres Pemuda Kedua

Pada 3 Mei 1928, Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia mulai menggelar rapat persiapan menuju Kongres Pemuda Kedua. Rapat itu dilanjutkan lagi pada 12 Agustus 1928 yang dihadiri perwakilan dari berbagai organisasi pemuda dan berhasil memutuskan akan menggelar Kongres pada 27-28 Oktober 1928. Dalam rapat tersebut disepakati susunan kepanitiaan sebagai berikut: Soegondo Djopoespito (PPPI) selaku ketua, R.M. Djoko Marsaid (Jong Java) selaku wakil ketua, Muhammad Yamin (Jong Soematanen Bond) selaku sekretaris, Amir Sjarifuddin (Jong Bataks Bond) selaku bendahara, Djohan Mohammad Tjaja (Jong Islamieten Bond) selaku pembantu I, R. Katjasoengkana (Pemoeda Indonesia) selaku pembantu II, R.C.L. Senduk (Jong Celebes) selaku pembantu III, Johannes Leimena (Jong Ambon) selaku pembantu IV, Rochjani Soe'oad (Pemoeda Kaoem Betawi) selaku pembantu V.

Dengan susunan kepanitiaan semacam itu akhirnya terselenggara Kongres Pemuda Kedua di Jakarta pada 27-28 Oktober 1928. Dari sekitar tujuh ratus peserta yang hadir, nama-nama peserta yang tercatat berjumlah 82 orang, sebagai berikut: Abdoel Halim, Abdoel Moethalib Sangadji, Abdoel Rachman, Abdoellah Sigit (Indonesische Studieclub), Aboe Hanifah, Achmad Hamami, Adnan Kapau Gani, Dr. Mohammad Amir (Dienaren van Indie), Anta Permana, Anwari, Arnold Mononutu, Assaat dt Muda, Bahder Djohan, Dali, Darsa Arsa, Dien Pantouw, Djuanda,

Dominee (pdt) van Hoorn, Dr. Pijper (Adviseur voor Inlandsche Zaken), Dr. Poerbatjaraka (Adviseur voor Inlandsche Zaken), Dr. Van der Plaas (Adviseur voor Inlandsche Zaken), Emma Poeradiredja, F. Dahler, Hoofdcommissaris van Politie van der Plugt, Inoe Martakoesoema, J.E. Stokvis, Jo Tumbuhan, Joesoepadi Danoehadiningrat, John Lau Tjoan Hok, Jos Masdani, Kadir, Karto Menggolo, Kasman Singodimedjo, Koentjoro Poerbopranoto, Kwee Thiam Hong, Ma'moen Ar Rasjid, Moehidin (Pasundan), Moekarno, Moewardi, Mohammad Ali Hanafiah, Mohammad Nazif, Mohammad Roem, Mohammad Tamzil, Mr. Sartono, Muhammad Husni Thamrin, Nona Tumbel, Oey Kay Siang, Patih Batavia, Raden Achmad, Poernamawoelan, R.M. Djoko Marsaid, Raden Soeharto, Raden Soekamso, Ramelan, S.M. Kartosoewirjo, Saerun (*Keng Po*), Sahardjo, Sarbaini, Sarmidi Mangoensarkoro, Setiawan, Siti Soendari, Sjahbuddin Latif, Sjahrial, Soedjono Djoened Poesponegoro, Soehara, Soejono (Volksraad), Soekamto, Soekmono, Soelaeman, Soemanang, Soemarto, Soenario (PAPI dan INPO), Soerjadi, Soewadji Prawirohardjo, Soewarni, Soewirjo, Soeworo, Tjahija, Tjio Djien Kwie, Tjokorda Gde Raka Sukawati (Volksraad), Wage Rudolf Supratman, Wilopo, dan Koesoemo Oetojo (Rahman 2016: 17-19).



Atas: Foto bersama panitia dan peserta Kongres Pemuda II, 28 Oktober 1928.

Bawah: Panitia Kongres Pemuda II diketuai Soegondo Djojopoespito, 28 Oktober 1928. (Sumber: Perpusnas)

Rangkaian Kongres tersebut terbagi ke dalam tiga rapat yang diselenggarakan di tempat yang berbeda-beda. Rapat pertama diadakan pada pukul 20.00 di gedung Katholieke Jongenlingen Bond yang berlokasi di Waterlooplein (sekarang Lapangan Banteng). Dalam rapat pertama ini, Muhammad Yamin berpidato tentang lima prasyarat persatuan Indonesia yakni sejarah, bahasa, hukum, pendidikan, dan kemauan.

Pidato ini ditanggapi secara positif oleh Inoe Martakoesoema yang menekankan pentingnya persatuan agar Indonesia bisa sejajar dengan Inggris dan Belanda. Secara tidak langsung, Inoe mau mengatakan bahwa persatuan berguna buat kemerdekaan Indonesia. Maksud ini ditangkap oleh Hoofdcommisaris van Politie bernama van der Plugt. Agen polisi itu memotong tanggapan Inoe dan mengimbaunya untuk meninggalkan kongres. Mr. Sartono kemudian memberikan tanggapan yang mempersoalkan polisi Belanda yang doyan main larang.

Rapat kedua diadakan di gedung bioskop Oost Java yang terletak di Koningsplein Noord (sekarang Jalan Medan Merdeka Utara). Dalam rapat kali ini Poernomowoelan dan Sarmidi Mangoensarkoro berbicara tentang pentingnya pendidikan kebangsaan yang membawa semangat demokratis di rumah dan sekolah. Selain itu, Siti Soendari mengajukan pandangannya tentang kondisi perempuan yang tertindas dalam masyarakat.

Rapat terakhir diadakan di gedung Indonesische Clubgebouw, Jalan Kramat Raya

106, yang merupakan rumah indekos kepunyaan Sie Kong Liang, di mana aktivis-aktivis pemuda seperti Muhammad Yamin dan Amir Sjarifuddin pernah menyewa. Dalam pertemuan itu, Soenario Sastrowardoyo menyampaikan pidato yang menekankan perlunya nilai-nilai nasionalisme dan demokrasi serta mengingatkan pentingnya gerakan pramuka dalam konteks pembentukan gerakan pemuda yang berorientasi kebangsaan.

Ketika itu, sempat terjadi insiden yang membawa risiko pembubaran Kongres oleh aparat keamanan. Pasalnya, terlontar frase "Indonesia merdeka" dari peserta Kongres. Pejabat kepolisian van der Plugt beserta barisan aparat intel kolonial (*Politieke Inlichtingen Dienst*) mengancam akan membubarkan Kongres seketika itu juga. Menghadapi ketegangan itu, Soegondo Djojopoespito selaku pimpinan Kongres segera menengahi dengan menyatakan bahwa pernyataan itu (maksudnya "Indonesia merdeka") tidak perlu dilontarkan secara eksplisit, cukup tahu sama tahu saja. Para peserta pun menyambutnya dengan riuh, gembira dan sesekali melontarkan nada mengolok-olok barisan aparat keamanan kolonial.

Dalam rapat terakhir itulah lagu *Indonesia Raya* dibawakan lewat gesekan biola Wage Rudolf Supratman dan sesudah itu dibacakan sebuah maklumat yang dinamai "Poatoesan Congres Pemoeda-Pemoeda Indonesia". Inilah dokumen yang kemudian kita kenal sebagai Sumpah Pemuda, sebuah dokumen historis pernyataan komitmen bersama tentang persatuan yang dirumuskan dalam tiga keputusan:

"Pertama

Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia.

Kedua

Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia.

Ketiga

Kami putra dan putri Indonesia mengaku menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia."

Lewat maklumat inilah para pemuda mendeklarasikan prinsip persatuan Indonesia, persatuan tanah air, bangsa dan bahasa.

Menuju Indonesia Muda

Isu yang mengedepan segera selepas terselenggaranya Kongres Pemuda Kedua adalah fusi antar organisasi pemuda. Pembicaraan tentang fusi merupakan konsekuensi logis dari cita-cita persatuan Indonesia yang diikrarkan dalam "Poetoesan Congres Pemoeda-Pemoeda Indonesia". Melalui rapat persiapan pada 23 April dan 25 Mei 1929 di gedung Indonesische Clubgebouw, ditetapkan susunan Komisi Besar Indonesia Muda: Koentjoro Poerbopranoto (Jong Java) selaku ketua, Muhammad Yamin (Jong Soematanen Bond) selaku wakil ketua, Joesoepadi (Pemoeda Indonesia) selaku penulis I, Sjahrial selaku penulis II, Assaat selaku bendahara I, Soewadji Prawirohardjo (Jong Java) selaku bendahara II, Adnan Kapau Gani (Jong Soematanen Bond)

selaku administratur I, Mohammad Tamzil (Pemoeda Indonesia) selaku administratur II, G.R. Pantouw (Jong Celebes) selaku pembantu I, Surjadi selaku pembantu II (Gunawan 2005: 29-30).

Tugas Komisi Besar ini adalah membentuk badan fusi bernama Indonesia Muda yang dirancang sebagai peleburan seluruh organisasi pemuda seluruh Indonesia.

Melalui kongres di gedung Habiprojo, Surakarta, antara 28 Desember 1930 dan 2 Januari 1931, berdirilah badan fusi Indonesia Muda. Dengan begitu, organisasi-organisasi pemuda kedaerahan seperti Jong Java, Jong Celebes, Jong Soematanen Bond, Sekar Roekoen dan sebagainya resmi dihapus. Seluruh anggota organisasi-organisasi tersebut dilebur ke dalam Indonesia Muda.

Saat pendiriannya Indonesia Muda memiliki 25 cabang di seluruh Indonesia dengan keanggotaan sebesar 2.393 orang. Tokoh-tokoh yang aktif dalam organisasi ini antara lain Muhammad Yamin, aktivis kemerdekaan Sukarni, penyair Amir Hamzah, novelis Armijn Pane dan aktivis buruh Suparna Sastra Diredja. Walaupun Indonesia Muda tidak secara langsung bergerak di lapangan politik, organisasi tersebut mendorong tercapainya prakondisi bagi perjuangan kemerdekaan. Hal ini dicapai lewat usaha-usaha Indonesia Muda dalam memberikan kursus-kursus bahasa persatuan, memberantas buta huruf dan terus menjalankan koordinasi dengan para pemuda se-Indonesia.

Setelah Sumpah Pemuda

Seperti layaknya terjadi dengan setiap dokumen sejarah, pemaknaan atas dokumen Sumpah Pemuda pun ikut berubah dan ditentukan oleh kondisi aktual yang tengah dihadapi bangsa Indonesia pada masa ketika pemaknaan ulang tersebut dihasilkan. Dalam proses tersebut, terjadi pergeseran penekanan dan paradigma dalam memandang pokok-pokok yang diikrarkan para pemuda tahun 1928.

Dalam Kongres Bahasa Indonesia pertama yang dilangsungkan di Surakarta, Oktober 1938, dapat dijumpai pergeseran rumusan Sumpah Pemuda yang paling awal. Kegiatan yang sedianya dilaksanakan untuk memperingati satu dasawarsa Sumpah Pemuda ini menggunakan rumusan sumpah yang berbeda dari aslinya:

"Kita bertumpah tanah satu, yaitu bangsa Indonesia

Kita berbangsa satu, yaitu bangsa Indonesia.

Kita berbahasa satu, yaitu bahasa Indonesia."

Kongres yang dihadiri oleh tokoh-tokoh Kongres Pemuda seperti Mohammad Tabrani, Armijn Pane dan Amir Sjarifuddin ini menggunakan rumusan "bertumpah tanah satu, yaitu bangsa Indonesia" ketimbang "bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia". Selain itu, alih-alih menempatkan bahasa Indonesia dalam upaya "menjunjung bahasa persatuan", Kongres ini menempatkannya sebagai "bahasa satu" (seolah dengan pengertian "bahasa satu-satunya").

Dalam Kongres Pemuda 1949 yang diselenggarakan setelah agresi militer Belanda kedua, dimunculkan suatu rumusan baru yang disebut sebagai "Semboyan Perjuangan":

"Satu bangsa – bangsa Indonesia

Satu bahasa – bahasa Indonesia

Satu tanah air – tanah air Indonesia

Satu negara – negara Indonesia"

Dalam rumusan ini, selain perubahan-perubahan yang mengacu pada Kongres Bahasa Indonesia pertama, muncul pula pokok sumpah yang baru, yakni pengakuan pada satu negara Indonesia. Urgensi dari penambahan baris terakhir itu dapat dipahami dalam konteks kemunculan Republik Indonesia Serikat yang tercipta sebagai hasil dari Konferensi Meja Bundar.

Pemaknaan ulang atas Sumpah Pemuda juga muncul dari tangan Muhammad Yamin sendiri sebagai salah satu perumus naskah sumpah yang asli. Pada tahun 1955, ia menerbitkan suatu pamflet bertajuk "Sumpah Indonesia Raya". Di sana, Yamin menempatkan signifikansi historis teks Sumpah Pemuda sebagai tonggak ketiga sejarah Nusantara, setelah prasasti Kedukan Bukit yang merupakan prasasti tertua Sriwijaya (683 M) dan Sumpah Palapa Majapahit (1331 M). Dengan begitu, Yamin hendak menekankan peran Indonesia sebagai sejenis "Kemaharajaan Ketiga" setelah Majapahit dan Sriwijaya.

Pada 1958, menjelang masa Demokrasi Terpimpin, rumusan Sumpah Pemuda pun bergeser kembali:

"Kami Putra-Putri Indonesia mengakui satu tanah air, tanah air Indonesia.

Kami Putra-Putri Indonesia mengakui satu bangsa, bangsa Indonesia.

Kami Putra-Putri Indonesia mengakui satu bahasa, bahasa Indonesia."

Kali ini, konteksnya adalah perjuangan melawan pemberontakan PRRI/Permesta. Konteks tersebut mengemuka dalam pidato Presiden Sukarno pada peringatan hari Sumpah Pemuda tahun 1958 ketika ia menyatakan bahwa pihak-pihak yang berusaha menghidupkan sentimen kedaerahan warisan kolonial berarti "mendurhakai Sumpah Pemuda yang keramat"

Pada masa Orde Baru, pengertian Sumpah Pemuda selalu dikaitkan dengan nilai kedisiplinan dalam rangka menyongsong pembangunan nasional dan pengamalan Pancasila. Dalam publikasi resmi perayaan Sumpah Pemuda pada tahun 1988, misalnya, dinyatakan sebagai berikut (Foulcher 2008: 63):

"Dengan semangat Sumpah Pemuda kita tingkatkan disiplin dan kualitas Generasi Muda Indonesia untuk memantapkan kerangka landasan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila."

Api perjuangan melawan kolonialisme yang tersirat dalam Sumpah Pemuda dan dipertahankan selama era Presiden Sukarno kemudian digantikan dengan visi pembangunan ekonomi dan internalisasi nilai-nilai Pancasila. Rumusan Sumpah Pemuda yang digunakan sepanjang era Orde Baru pun adalah rumusan "satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa" yang sebetulnya melenceng dari rumusan asli Sumpah Pemuda.

Gerakan pemuda dan mahasiswa yang menggulirkan Reformasi memberikan warna baru pada Sumpah Pemuda. Di kalangan aktivis mahasiswa ini dikenal suatu versi Sumpah Pemuda yang berbunyi (Foulcher 2008: 74):

"Kami mahasiswa Indonesia mengaku bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan.

Kami mahasiswa Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa yang gandrung akan keadilan.

Kami mahasiswa Indonesia mengaku berbahasa satu, bahasa kebenaran."

Dengan penekanan baru seperti ini, muncul kembali semangat anti-penjajahan dan anti-diskriminasi yang termaktub dalam Sumpah Pemuda. Dengan tumbangannya Orde Baru di tangan gerakan pemuda, dimulailah masa Reformasi di mana versi asli Sumpah Pemuda kembali dijadikan acuan utama.

Sumpah Pemuda dan Jiwa Merdeka

Secara historis, Sumpah Pemuda merupakan tonggak penting dalam rangkaian perjuangan melawan kolonialisme dan pelampauan atas feodalisme kedaerahan. Ini merupakan suatu perjuangan menuju kebangsaan Indonesia yang merdeka, yaitu kebangsaan Indonesia yang berdaulat, berdikari dan berkepribadian. Jiwa merdeka telah meresap pada setiap butir Sumpah Pemuda.

Cita-cita kemerdekaan dan pembebasan dari kolonialisme serta feodalisme yang terpendam dalam Sumpah Pemuda ini diwarisi oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan rumusan awal Pancasila 1 Juni 1945.

Dalam kalimat pertama Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa "kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan". Di situ, penghapusan penjajahan atau kolonialisme merupakan cita-cita bangsa yang dinyatakan secara tersurat. Dengan begitu, Republik Indonesia diikat oleh komitmen luhur bertujuan untuk menghapuskan segala bentuk kolonialisme dan warisannya.

Dalam teks Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 juga dinyatakan bahwa Republik Indonesia dicirikan oleh "kedaulatan rakyat". Dalam tatanan politik yang berlandaskan pada prinsip kedaulatan rakyat, segala bentuk eksploitasi dan hubungan yang timpang akan dihapuskan. Ini merupakan pengejawantahan langsung dari

semangat kemerdekaan itu sendiri. Tidak ada kemerdekaan tanpa usaha terus-menerus untuk mewujudkan kesetaraan.

Hal itu diperjelas lagi dalam pidato "Lahirnya Pancasila" yang disampaikan Presiden Sukarno pada 1 Juni 1945. Dalam pidato tersebut, ia menyatakan:

"Kita hendak mendirikan suatu negara 'semua buat semua'. Bukan buat satu orang, bukan buat satu golongan, baik golongan bangsawan, maupun golongan yang kaya, - tetapi 'semua buat semua'."

Melalui pidato tersebut, Presiden Sukarno memperlihatkan bahwa kolonialisme terjadi bukan hanya akibat faktor eksternal, melainkan juga karena adanya faktor internal. Faktor internal itu adalah ketidakadilan dan penindasan antar-golongan di antara masyarakat feodal Nusantara sendiri. Karenanya, kemerdekaan hanya bisa diraih bila kita menggencarkan usaha untuk menghapuskan segala bentuk feodalisme yang membuat manusia tidak setara satu sama lain, dan dengan begitu sekaligus juga menghapuskan penyebab internal dari kolonialisme.

Jiwa merdeka ini tak pelak lagi diwarisi Presiden Sukarno dari semangat kebangsaan Sumpah Pemuda. Lewat Sumpah Pemuda lah muncul imajinasi awal tentang Indonesia sebagai bangsa yang bebas dari kolonialisme dan feodalisme. Dalam api Sumpah Pemuda lah jiwa merdeka bangsa Indonesia dimatangkan.

Dua dasawarsa setelah Sumpah Pemuda, pada 1948, seorang pemuda 26 tahun menulis sajak pada Presiden Sukarno:

Ayo ! Bung Karno kasi tangan mari kita bikin janji

Aku sudah cukup lama dengan bicaramu dipanggang diatas apimu, digarami lautmu

Dari mulai tgl. 17 Agustus 1945

Aku melangkah ke depan berada rapat di sisimu

Aku sekarang api aku sekarang laut

Bung Karno ! Kau dan aku satu zat satu urat

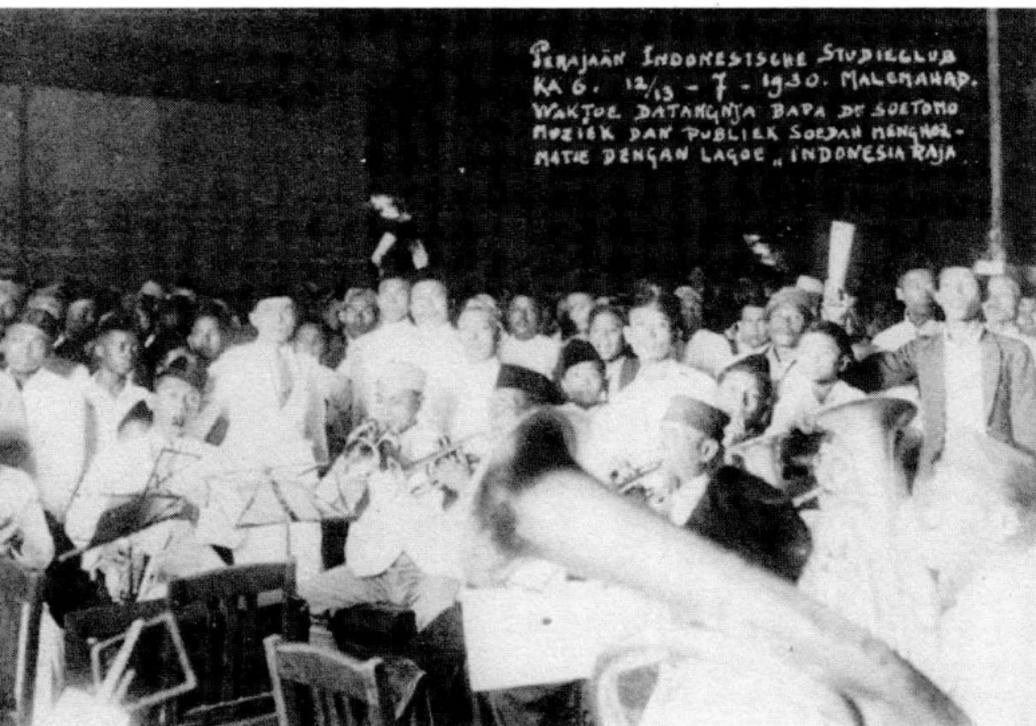
Di zatmu di zatku kapal-kapal kita berlayar

Di uratmu di uratku kapal-kapal kita bertolak & berlabuh

Sajak ini ditulis oleh Chairil Anwar, penyair muda yang mengalami langsung masa-masa genting kemerdekaan. Ia tak mengalami Sumpah Pemuda. Tetapi kita bisa merasakan getar pengaruh ikrar itu pada suara sang penyair. Dalam kata-katanya, kita temukan gema semangat muda pergerakan kebangsaan 1928. Dalam kata-katanya, kita temukan api dan laut Sumpah Pemuda.

Disarikan dari:

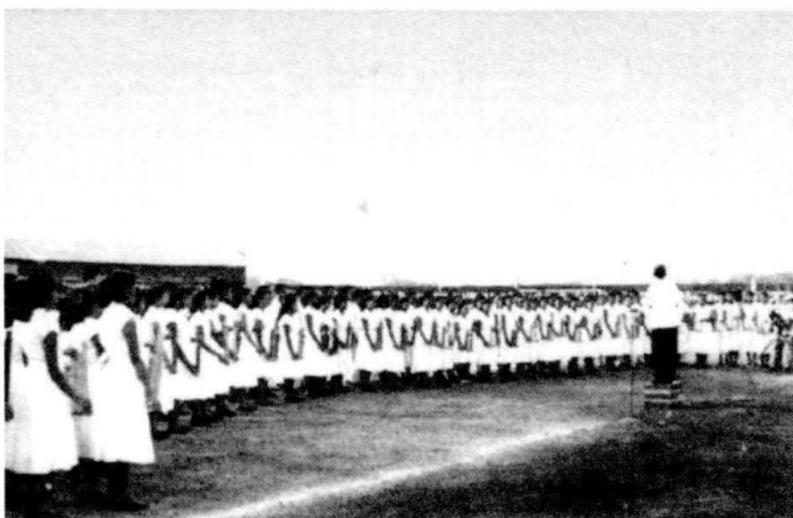
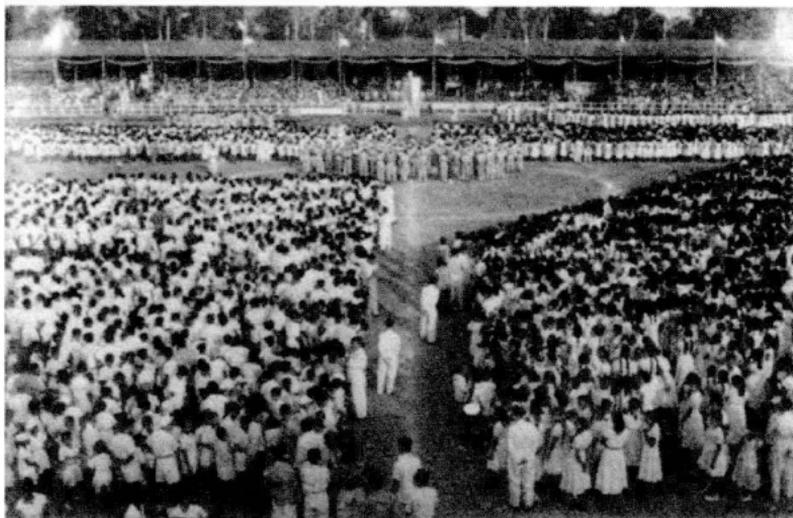
- B. Soelarto. 1986. *Dari Kongres Pemuda Indonesia Pertama ke Sumpah Pemuda*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Edi Cahyono, ed. 2003. *Jaman Bergerak di Hindia Belanda: Mozaik Bacaan Kaoem Pergerakan Tempo Doeloe*. Jakarta: Yayasan Pancur Siwah.
- Keith Foulcher. 2008. *Sumpah Pemuda: Makna & Proses Penciptaan Simbol Kebangsaan Indonesia*. Depok: Komunitas Bambu
- M.C. Ricklefs. 1981. *A History of Modern Indonesia*. London: Macmillan.
- Momon Abdul Rachman. 2016. *Buku Panduan Museum Sumpah Pemuda*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Museum Sumpah Pemuda.
- Nunus Supardi. 2013. *Bianglala Budaya: Rekam Jejak 95 Tahun Kongres Kebudayaan 1918-2013*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan.
- Restu Gunawan. 2005. *Muhammad Yamin dan Cita-Cita Persatuan Indonesia*. Yogyakarta: Ombak.
- R.Z. Leirissa, et.al. 1989. *Sejarah Pemikiran tentang Sumpah Pemuda*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional.
- Takashi Shiraishi. 1997. *Zaman Bergerak: Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926*. Diterjemahkan oleh Hilmar Farid. Jakarta: Grafiti.



Hari Ulang Tahun Indonesische Studiclub keenam dimeriahkan dengan mengumandangkan lagu Indonesia Raya menyambut tibanya Dr. Soetomo, 12-13 Juli 1930. (Sumber: Perpunas)

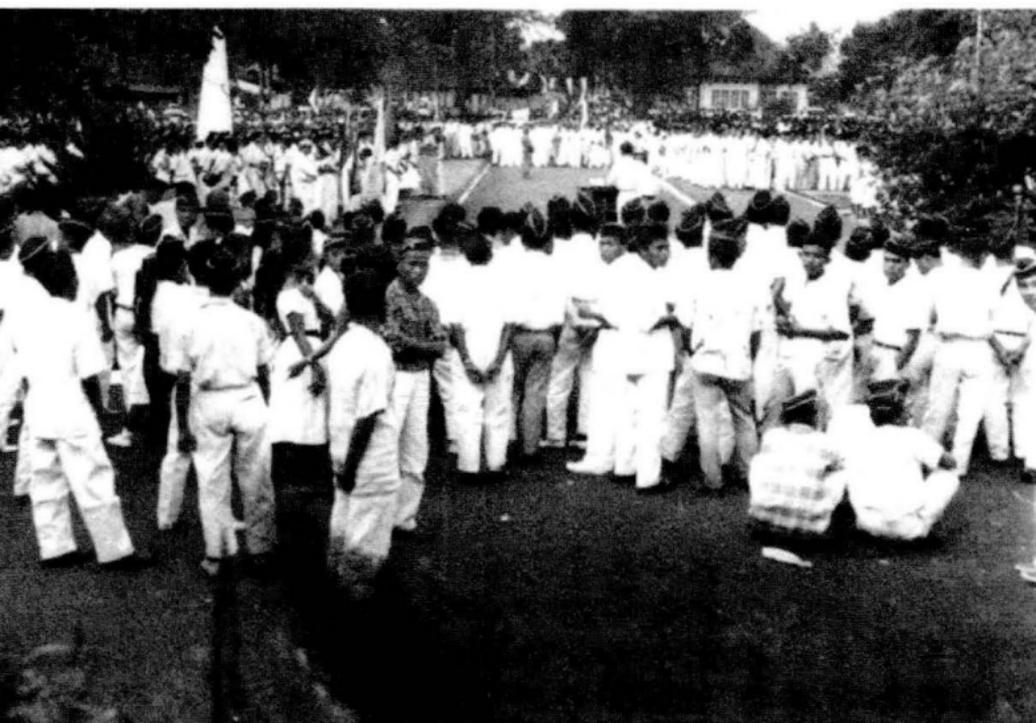


Peserta sedang menyanyikan lagu Indonesia Raya di halaman Istana Negara dan disaksikan Presiden Soekarno, Ibu Fatmawati, Wapres Moh. Hatta, dan Ibu Rachmi Hatta, 28 Oktober 1948. (Sumber: Perpunas)



Upacara peringatan 25 tahun lahirnya lagu Indonesia Raya di Lapangan IKADA, 28 Oktober 1953. (Sumber: Perpusnas)





Kiri dan kanan: Upacara peringatan Sumpah Pemuda di Pegangsaan Timur no. 56, 28 Oktober 1959. (Sumber: Perpusnas)



W.R. Supratman pada umur 21 tahun.
(Sumber: Museum Sumpah Pemuda)

Riwayat Hidup W.R. Supratman

Wage Rudolf Supratman dilahirkan pada Senin Wage, 9 Maret 1903 di Desa Somongari yang terletak sekitar 12 kilometer sebelah tenggara Kota Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Ayahnya, Jumeno Senen Sastrosuharjo, adalah seorang serdadu KNIL berpangkat sersan, sementara ibunya bernama Siti Senen. Pada malam kelahirannya, sang ayah memberinya nama Wage Supratman. Akan tetapi, pada umur sebelas tahun, nama Rudolf ditambahkan padanya supaya memudahkan Supratman masuk ke Europeesche Lagere School, Sekolah Dasar yang mayoritas diisi anak-anak Belanda.

Pada 1914, Supratman mengikuti kakak sulungnya, Rukiyem, ke Makassar. Di sana, ia bersekolah sampai ke taraf Normalschool. Supratman lantas bekerja di kantor pengacara Belanda, kemudian sebagai guru Sekolah Angka 2 dan juga di kantor sebuah perusahaan dagang serta firma hukum. Semasa tinggal di Makassar inilah bakat musiknya dikembangkan oleh kakak iparnya, suami Rukiyem, yang berprofesi sebagai guru musik tentara kolonial. Sastromiarjo alias Willem Mauritius van Eldik, sang kakak ipar, mengajarnya bermain biola.

Sepulangnya ke Pulau Jawa pada 1924, Supratman bekerja sebagai wartawan di Bandung dan Jakarta. Ia menyumbangkan artikel-artikel pelaporan pada surat kabar *Kaoem Moeda*, *Kaoem Kita* dan juga *Sin Po*. Pada masa-masa inilah ketertarikannya pada dunia pergerakan kebangsaan

yang sudah muncul semasa ia di Makassar semakin menguat dan ia pun mulai bergaul dengan para tokohnya. Dalam suasana perjuangan kebangsaan inilah Supratman menciptakan sejumlah lagu-lagu perjuangan yang membangkitkan semangat patriotik. Gubahan pertamanya adalah sebuah lagu berjudul *Dari Barat Sampai Ke Timur*:

*Dari Barat sampai ke Timur
Berjajar pulau-pulau
Sambung menyambung menjadi satu
Itulah Indonesia*

*Indonesia Tanah Airku
Aku berjanji padamu
Menjunjung Tanah Airku
Tanah Airku Indonesia*

Lagu perjuangan yang diciptakan pada 1926 ini dari segi musik menyerupai lagu *La Marseillaise*, sebuah lagu perjuangan Revolusi Prancis yang kemudian diadopsi sebagai lagu kebangsaan Prancis.

Sekitar masa inilah Supratman membaca sebuah artikel di majalah *Timboel* terbitan Solo yang menantang para komponis Indonesia untuk menciptakan lagu kebangsaan Indonesia. Tantangan ini juga dibarengi dengan kabar yang tersiar dari Indonesische Clubgebouw yang menghendaki supaya segera diciptakan lagu kebangsaan Indonesia. Menjawab kebutuhan historis bangsa ini, Supratman mengubah lagu *Indonesia Raya* yang pada subjudulnya dengan terang tertulis "lagu kebangsaan".

Pada 8 September 1944, Panitia Lagu Kebangsaan menetapkan sejumlah perubahan kecil atas lagu *Indonesia Raya* dengan ketentuan umum: apabila dinyanyikan satu stanza saja, maka ulangnya dinyanyikan dua kali, sedangkan jika dinyanyikan tiga stanza, maka ulangnya dinyanyikan satu kali pada dua stanza pertama dan dua kali pada stanza ketiga. Pada 26 Juni 1958, dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah No. 44 yang menetapkan gubahan, irama, nada dan tata tertib dalam membawakan lagu tersebut.

Kisah dikumandangkannya lagu *Indonesia Raya* dalam Kongres Pemuda II punya latar yang menarik. Sebagai wartawan koran *Sin Po*, Supratman pernah meliput Kongres Pemuda I yang diselenggarakan antara 30 April dan 2 Mei 1926. Ketika akan diselenggarakan Kongres Pemuda II yang nantinya menghasilkan Sumpah Pemuda, Supratman pun ditugasi meliputnya kembali.

Mula-mula, demi keperluan liputan, Supratman bertemu dengan Soegondo Djojopoespito, salah seorang tokoh muda dan kawan satu indeks Sukarno ketika di Surabaya. Dalam pertemuan itu, ia diminta Soegondo membawakan lagu *Indonesia Raya* dalam suatu acara di gedung *Indonesische Clubgebouw*, Jalan Kramat Raya 106. Acara inilah yang kemudian digelar sebagai Kongres Pemuda II. Pada malam 28 Oktober 1928, tepat sebelum putusan Kongres dibacakan, W.R. Supratman membawakan *Indonesia Raya* dalam gesekan biola. Atas pertimbangan Soegondo, demi menghindari represi oleh agen-agen kolonial yang terus memantau keseluruhan acara, lagu itu pun sengaja tidak dinyanyikan.



***“Selamat tinggal tanah airku
Tanah tumpah darahku
Indonesia tanah berseri
Tanah yang aku sayangi
Selamat tinggal bangsaku!”***

W.R. Supratman, 1938.

Kiri: W.R. Supratman bersama adiknya.

Pada 1930, lagu *Indonesia Raya* dilarang dinyanyikan di depan umum. Pemerintah kolonial menganggap lagu itu subversif dan mengganggu "ketenangan dan ketertiban" (*rust en orde*). Lagu tersebut dikhawatirkan dapat memicu semangat kemerdekaan atau pemberontakan terhadap pemerintah yang sah. Seiring dengan pelarangan lagu *Indonesia Raya*, Supratman pun ditangkap polisi dan diinterogasi badan intelijen kolonial (*Politieke Inlichtingen Dients*). Pelarangan tersebut memicu protes yang meluas sampai menjadi perdebatan keras di Volksraad.

Dalam menyuarkan cita-cita kemerdekaan, Supratman tak hanya berhenti pada gubahan musik. Ia juga menulis novel berjudul *Perawan Desa* yang ditulis dan diterbitkan pada 1929. Novel itu berkisah tentang kesengsaraan hidup di bawah kolonialisme yang dipotret melalui cerita para kuli kontrak di tanah perkebunan Deli, Sumatra Utara. Karena mengandung kritik atas pemerintah kolonial, novel itu pun disita dan dimusnahkan oleh aparat Belanda.

Selain menggubah *Indonesia Raya*, *Dari Barat Sampai Ke Timur*, serta sejumlah lagu mars pergerakan, W.R. Supratman juga mencipta *Ibu Kita Kartini*, yang terinspirasi dari liputannya atas Kongres Perempuan Indonesia I di Yogyakarta, 22-25 Desember 1928, dan *Matahari Terbit*. Lagu terakhir itu dianggap subversif oleh pemerintah kolonial dan menggiring Supratman dijebloskan ke penjara Kalisosok, Surabaya, pada Agustus 1938. Kelelahan fisik dan psikis membuat W.R. Supratman jatuh sakit dan akhirnya meninggal di

Surabaya, Jawa Timur, pada 17 Agustus 1938. Pada detik-detik penghabisannya, ia menulis secarik surat wasiat (Rahman 2016: 34):

*"Selamat tinggal tanah airku
Tanah tumpah darahku
Indonesia tanah berseri
Tanah yang aku sayangi
Selamat tinggal bangsaku!"*

Biola W.R. Supratman

Seperti sebagian komponis besar dunia, W.R. Supratman mengubah seluruh komposisi musiknya dengan biola. Ia mengubah lagu *Indonesia Raya*, *R.A. Kartini*, dan seluruh karyanya dengan sebuah biola yang diberikan oleh Willem Mauritius van Eldik, kakak iparnya, pada 1914. Dengan biola inilah ia maju ke hadapan hadirin Kongres Pemuda Kedua dan membawakan untuk pertama kalinya sebuah komposisi musik instrumental yang kita kenal sebagai *Indonesia Raya*.

Biola W.R. Supratman memiliki dimensi dengan panjang badan 36 sentimeter, lebar badan pada bagian terlebar 20 sentimeter dan 11 sentimeter bagian tersempit, tebal tepian biola 4,1 sentimeter dan tebal bagian tengah 6 sentimeter. Biola ini terbuat dari tiga jenis kayu yaitu cyprus atau jati Belanda untuk papan depan, maple Italia untuk papan samping, papan belakang, leher dan kepala biola serta kayu eboni Afrika Selatan untuk bagian snare holder, penggulung senar, kriplang dan end pin.

Pada bagian dalam biola tertulis "Nicolaus Amatus Fecit in Cremona 16". Biola ini dibeli van Eldik di sebuah toko alat musik Makassar pada 1914. Kemungkinan biola itu merupakan salinan dari model biola buatan Nicolo Amati, seorang pembuat biola terbaik dari keluarga Amati yang hidup di Cremona, Italia, pada abad ke-17. Berkat nama besarnya, model biola Nicolo Amati (atau Nicolaus Amatus dalam versi Latin namanya) banyak disalin di Jerman dan beberapa negara lain pada akhir abad ke-19. Salinan itulah yang kemungkinan dibeli van Eldik dan diberikan kepada W.R. Supratman.

Dengan biola inilah W.R. Supratman menjadi anggota Black and White Jazz Band di Makassar dan anggota orkes Gedung Societet Concordia di Bandung, pada 1924. Dengan biola inilah pula ia maju ke hadapan hadirin Kongres Pemuda Kedua dan membawakan untuk pertama kalinya sebuah komposisi musik instrumental yang kita kenal sebagai Indonesia Raya.

Sepeninggal W.R. Supratman, biola itu dirawat oleh kakaknya, Rukiyem, sebelum akhirnya diserahkan ke Museum Sumpah Pemuda pada 1974. Oleh pihak Museum, biola tersebut dirawat dengan perhatian khusus karena merupakan aset negara. Sesekali biola itu dibawa keluar untuk dimainkan pada acara-acara khusus, misalnya dimainkan oleh Idris Sardi pada peringatan Hari Sumpah Pemuda pada 2005 dan 2007. Sampai hari ini, biola Amatus W.R. Supratman itu disimpan dalam ruang penyimpanan tertutup Museum Sumpah Pemuda. Karena alasan keamanan, para pengunjung hanya diperbolehkan melihat replika dari biola tersebut di ruang pameran.

Disarikan dari:

Anthony C. Hutabarat. 2001. *Wage Rudolf Supratman: Meluruskan Sejarah dan Riwayat Hidup Pencipta Lagu Kebangsaan Republik Indonesia "Indonesia Raya" dan Pahlawan Nasional*. Jakarta: Gunung Mulia.

Bambang Sularto. 2012. *Wage Rudolf Supratman*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya.

Mirnowati. 2012. *Kumpulan Pahlawan Indonesia Terlengkap*. Depok: Penerbit CIF.

Momon Abdul Rahman. 2016. *Wage Rudolf Supratman: Sang Pencipta Lagu Kebangsaan Indonesia Raya*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Museum Sumpah Pemuda.

St. Sularto dan D. Rini Yunarti. 2010. *Konflik Di Balik Proklamasi: BPUPKI, PPKI dan Kemerdekaan*. Jakarta: Kompas.

http://www.si.edu/Encyclopedia_SI/nmah/amati.htm

<http://www.antaranews.com/berita/461355/cerita-biola-wr-supratman>

Indonesia Raya

(Tiga Stanza)

I

Indonesia tanah airku,
Tanah tumpah darahku,
Di sanalah aku berdiri,
Jadi pandu ibuku.

Indonesia kebangsaanku,
Bangsa dan tanah airku,
Marilah kita berseru,
Indonesia bersatu.

Hiduplah tanahku,
Hiduplah negriku,
Bangsaku, Rakyatku, semuanya,
Bangunlah jiwanya,
Bangunlah badannya,
Untuk Indonesia Raya.

Ulangan

Indonesia Raya,
Merdeka, merdeka,
Tanahku, negriku yang kucinta!
Indonesia Raya,
Merdeka, merdeka,
Hiduplah Indonesia Raya.

II

Indonesia, tanah yang mulia,
Tanah kita yang kaya,
Di sanalah aku berdiri,
Untuk slama-lamanya.

Indonesia, tanah pusaka,
P'saka kita semuanya,
Marilah kita mendoa,
Indonesia bahagia.

Suburlah tanahnya,
Suburlah jiwanya,
Bangsanya, Rakyatnya, semuanya,
Sadarlah hatinya,
Sadarlah budinya,
Untuk Indonesia Raya.

Ulangan

Indonesia Raya,
Merdeka, merdeka,
Tanahku, negriku yang kucinta!
Indonesia Raya,
Merdeka, merdeka,
Hiduplah Indonesia Raya.

III

Indonesia, tanah yang suci,
Tanah kita yang sakti,
Di sanalah aku berdiri,
N'jaga ibu sejati.

Indonesia, tanah berseri,
Tanah yang aku sayangi,
Marilah kita berjanji,
Indonesia abadi.

S'lamatlah rakyatnya,
S'lamatlah putranya,
Pulaunya, lautnya, semuanya,
Majulah negrinya,
Majulah pandunya,
Untuk Indonesia Raya.

Ulangan

Indonesia Raya,
Merdeka, merdeka,
Tanahku, negriku yang kucinta!
Indonesia Raya,
Merdeka, merdeka,
Hiduplah Indonesia Raya

INDONESIA RAJA

(Lagoe Kebangsaän Indonesia)



Harga / 0.20

Terkarang dan diterbitkan oleh:
W. R. SOEPRATMAN
PUBLICIST.
WELTEVRÉDEN
(JAVA)

Tipe. SIN POC. Batavia

Harian *Sin Po* yang memuat lagu *Indonesia Raya*.
(Sumber: Perpunas)

INDONESIA

Jangan terlaloe lujat

Lagu dannja
oleh W. R. Oeprotomo

3.4 || 5.1 | 3.3 2.2 | i.5 | 5.5 | 6 5 | 4 3 | 2 1 | 0 2.3 |

In-do-ne-si-a, ta-nah a-ir-hoe, Ta-nah teem-pah da-rat-hoe; — Di-ra-

4 2 | 2 7.7 | 7 6 | 5 5.5 | 7 6 | 5 4 | 3.0 | 3.4 |

na-lah — a-hoe ber-di-ri, — Men-dja-ga Pan-doe l-boe-koe — In-do-

5.1 | 3.3 2.2 | i.5 | 5.5 6 5 | i.2 | 7. | 6.0 6.6 |

ne-ri-a ke-bang-sa-an-hoe, — Ke-bang-sa-an ta-nah a-ir-hoe, Ma-ri-

4 4 3 2 | 5. | i.7.6 | 5 4 | 3 2 | i. | 0 5.5 |

lah hi-ta ber-se — roe, — In-do — ne-sia ber-se — loe" Hi-deep-

6 4.4 | 4 4.4 | 3 i.i | i. | i.i | 2 5.5 | 5 4.4 |

lah ta-nah-hoe, Hi-deep-lah ne-g'ri-hoe, Bang-sa-hoe, dji-wa-hoe se-moe-

3.0 | 5.5 6 4.4 | 4 4.4 | 3 i.i | i. | i.i | 2 5.5 |

a; — Da-ngoen-lah ra-jat-nja, Da-ngoen-lah In-dan-nja, Oen-toek In-do-ne-

5 5.3 | i.0 | i.i | 4 6.6 6 6 6 5 3.3 | 3 5.5 | 4 2.2 |

si-a Ra-ja. — In-do — nes' In-do — nes' Moe-li-a, Moe-li-a ta-nah-hoe ne-g'ri-

2 6.4 | 3. | i.0 | i.i | 4 6.6 6 6.6 | 5 5.3 | 3 5.5 |

hoe jang hoe-ijin — ta, In-do — nes' In-do — nes' Moe-li-a, Moe-li-a Hi-deep-

5.5 4.3 | 2 3.2 || i. | 0 | i.i | i. | i. |

lah In-do-ne-si-a Ra — ja. — In-do — ja

II.

Indonesia, tanah jang moelia,
Tanah kita jang kaja.

Disanaia, akoe hidoep,
Oentoek s'lama-lamanja.

Indonesia, tanah poesaka,
Poesaka kita semoeanja.

Marilah kita berseroe:
„Indonesia Bersatoe”.

Soeboerlah tanahnja,
Soeboerlah djiwanja.
Bangsanja, rajatnja, semoea.
Sedarlah hatinja,
Sedarlah boedinja,
Oentoek Indonesia Raja.

PENOEETOE P :

Indones', Indones',
Moelia, Moelia,
Tanahkoe, neg'rikoe jang koetjinta.
Indones', Indones',
Moelia, Moelia,
Hidoeplah Indonesia Raja.

III.

Indonesia, tanah jang soetji,
Bagi kita disini.

Disanalah kita berdiri,
Mendjaga lboe sedjati.

Indonesia, tanah berseri,
Tanah jang terkoetjintai.

Marilah kita bernjanji:
„Indonesia Bersatoe”.

S'lamatlah rajatnja,
S'lamatlah poet'ranja.
Poelaunja, laoetnja, semoea.
Madjoelah neg'rinja.
Madjoelah Pandoenja.
Oentoek Indonesia Raja.

PENOEETOE P :

Indones', Indones',
Moelia, Moelia,
Tanahkoe, neg'rikoe jang koetjinta.
Indones', Indones',
Moelia, Moelia,
Hidoeplah Indonesia Raja.



Lagu Kebangsaan dan Nasionalisme

Gunawan Wiradi

Pengamatan Umum

Beberapa tahun terakhir ini wacana tentang nasionalisme seringkali menjadi perdebatan secara berulang, namun belum pernah tuntas. Suatu saat orang ramai berdebat, tapi tak lama isu itu lantas tenggelam, untuk kemudian muncul kembali dengan perdebatan serupa.

Kebijakan Orde Baru yang cenderung berpihak kepada kekuatan modal telah membawa Bangsa Indonesia ke dalam keterpurukan yang sangat memprihatinkan. Aset bangsa yang paling asasi, yaitu tanah dan air, terampas dari tangan rakyat. Konflik agraria ("agraria" dalam arti luas) merebak di mana-mana walaupun konflik tersebut terkemas dalam wajah konflik etnik, konflik agama, konflik penduduk asli lawan pendatang, dan sebagainya. Sementara itu, praktek kehidupan di berbagai bidang pun menjadi carut-marut.

Sebagai salah satu tanggapan terhadap kenyataan tersebut, muncullah isu dalam masyarakat berupa pertanyaan "apakah semangat nasionalisme kita memang sudah ter-erosi?". Maka merebaklah berbagai pendapat, yang jika dikelompokkan secara garis besar dapat dibedakan adanya tiga pandangan utama.

Pandangan pertama adalah dari mereka yang menganggap bahwa sejak saat ini, nasionalisme itu sudah tidak relevan lagi, karena kita menghadapi

arus dominan dunia yaitu "era globalisasi". Bahkan lebih jauh lagi, mereka ini sampai mempertanyakan keabsahan konsep "negara-bangsa" (*nation-state*). Disadari atau tidak, dengan kemasam "ilmiah" ataupun bukan, langsung atau tidak langsung, sengaja atau tidak sengaja, mereka ini dapat menjadi perpanjangan tangan dari kekuatan kapitalisme internasional dan kolonialisme baru yang memang menghendaki agar negara-negara berkembang menjadi tercabik-cabik sehingga mudah dikuasai.

Pandangan kedua adalah dari mereka yang agaknya berusaha untuk kompromi, yaitu dengan melemparkan istilah "nasionalisme baru". Namun isinya seperti apa, tidak terlalu jelas, kecuali sekedar menganggap bahwa seolah-olah konsep nasionalisme yang dirumuskan para pendiri bangsa ini adalah nasionalisme sempit. Inilah cermin bahwa di antara kita memang masih banyak yang ternyata tidak memahami benar apa yang pernah dipikirkan oleh para pendahulu kita. Atau, barangkali kelompok kedua ini sebenarnya secara tak sadar hanya mencerminkan sikap defensif. Artinya, bawah sadarnya sebenarnya masih tebal nasionalismenya (dan karenanya akan tersinggung jika dituduh a-nasional), namun karena dalam kesehariannya, langsung atau tak langsung sudah terlanjur turut serta terlibat dalam praktek-praktek a-nasional, maka lantas melontarkan istilah "nasionalisme baru".

Pandangan ketiga adalah dari mereka yang menganggap perlunya kita kembali kepada khitah perjuangan kemerdekaan. Oleh para pendiri republik kita ini, sudah berkali-kali dijelaskan

bahwa nasionalisme kita tidak bersifat *chauvinistic*, bukan "*fanatical unreasoning devotion to one race, etc!*" Nasionalisme kita adalah nasionalisme pembebasan rakyat, yaitu pembebasan dari *l'exploitation de l'homme par l'homme* [penindasan manusia oleh manusia—ed.]. Bukan nasionalisme sempit.

Catatan renungan ini tidak akan membahas adu argumen secara rinci mengenai masalah nasionalisme, melainkan sekedar mencoba mengidentifikasi gejala-gejala apa sajakah yang memberikan tanda-tanda luntarnya semangat nasionalisme itu. Inipun tidak akan semuanya dipaparkan di sini, melainkan hanya satu dua contoh saja, khususnya yang berkaitan dengan pemaknaan perilaku simbolik bangsa kita.

Kadangkala kita mendengar pernyataan orang bahwa di zaman modern ini kita tidak membutuhkan simbol-simbol, slogan-slogan, semboyan-semboyan, dan sebagainya. Itu tak ada gunanya lagi, katanya, karena banyak semboyan kosong. Namun seorang antropolog kenamaan pernah menyatakan bahwa kita jangan sekali-kali melecehkan adanya slogan-slogan, semboyan, ritual-ritual, simbol-simbol, dan sebagainya, karena bagaimanapun juga, masyarakat membutuhkan hal itu, dan selalu punya makna.

Semua itu kadang memang tampak "kosong" karena dilakukan, ditempatkan atau diucapkan, pada tempat dan/atau waktu yang salah. (Lihat juga Clifford Geertz dalam David Apter, 1964: 47-76).

Dua contoh gejala perilaku simbolik bangsa kita yang barangkali dapat ditafsirkan sebagai gejala atau tanda-tanda (akan) lunturnya semangat nasionalisme dan kerakyatan kita (baik secara sadar sengaja ditanamkan, ataupun mungkin secara tak sadar, sehingga dalam proses menjadi "tertanam"kan), adalah:

Pertama, setiap kali ada acara resmi, pembukaannya selalu diisi dengan upacara simbolik: "memukul gong". Tanpa sadar, kita dituntut untuk menjadi "yes men"! Dalam gamelan Jawa, setelah semua instrumen berbunyi riuh rendah, setiap gending (lagu) ditutup dengan gong. Dalam setiap musyawarah, tiap orang ramai berbicara. Tapi kemudian mufakat?! yes! Jadi, gong itu adalah penutup! Bukan pembuka! Kenapa dijadikan simbol pembuka? Karena penguasa memang menghendaki agar belum-belum rakyat sudah menurut saja.

Kedua, sudah menjadi tradisi, setiap tanggal 17, tiap bulan, di istana dilakukan upacara pengibaran bendera Sang Saka Merah Putih memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan, walaupun sangat sederhana (tidak seperti 17 Agustus tiap tahun). TVRI hampir tak pernah menyiarkannya. Namun selama Orde Baru, yang selalu disiarkan adalah bukan upacara pagi harinya, melainkan justru upacara serius di sore hari yang disebut Parade Senja, yaitu penurunan Sang Merah Putih. Apa artinya ini? Dalam budaya Jawa (khususnya Solo-Yogya), kiasan sindiran terhadap orang yang ingin menonjolkan diri adalah "ngerek gendero" (mengibarkan bendera).

Jadi, dapat ditafsirkan, bahwa penurunan bendera dalam Parade Senja yang khidmat itu seolah mengamanatkan agar kita bersikap rendah hati, tidak menonjolkan diri. Amanat yang luhur! Namun eksekusinya, lama-lama kita melecehkan "harga diri", mengingkari identitas kita sebagai Bangsa Indonesia.

Seperti kita ketahui simbol-simbol yang paling penting dan mendasar dari setiap negara (bangsa) adalah tiga, yaitu, Bendera, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan. Nah, di samping dua contoh tersebut di atas, salah satu gejala yang menandai surutnya semangat nasionalisme adalah bagaimana sikap kita terhadap lagu kebangsaan *Indonesia Raya*. Inilah tema pokok "Renungan" ini.

Lagu Kebangsaan *Indonesia Raya*

Setiap kali ada upacara resmi, kita semua menyanyikan lagu kebangsaan. Ini dulu! Lama-lama, tidak semua upacara resmi dibuka dengan menyanyikan lagu kebangsaan, bahkan upacara yang bersifat kenegaraan pun pernah ada (atau mungkin banyak?) yang tak lagi dibuka dengan menyanyikan lagu tersebut. Mungkin maksudnya menghemat waktu. Benarkah? Menyanyikan lagu *Indonesia Raya* itu hanya memerlukan waktu kurang dari 10 menit! Mengapa hanya demi menghemat waktu sependek itu harus mengorbankan simbol identitas bangsa? Padahal, sekarang ini dalam prakteknya, hampir semua acara resmi (seminar, lokakarya, pertemuan dinas, atau apapun), tidak ada yang tidak terlambat. Selalu tidak tepat waktu.

Bahkan kadang mundurnya sampai lebih dari satu jam. Bukankah itu justru jauh membuang waktu?

Dahulu, hampir semua orang hafal dengan lirik lagu *Indonesia Raya*. Sekarang, mulai banyak orang yang tidak lagi hafal terhadap lirik lagu tersebut. Padahal, yang setiap kali kita nyanyikan itu barulah stanza (couplet) pertama. Sedangkan *Indonesia Raya* itu sebenarnya terdiri atas 3 (tiga) stanza. Jika stanza pertama saja tidak hafal, bagaimana mungkin bisa menghafal tiga stanza yang memang panjang-panjang itu.

Sebagai sekedar perbandingan, lagu kebangsaan Inggris terdiri dari 4 stanza, yang masing-masing terdiri dari 7 baris pendek. Amerika mempunyai dua lagu kebangsaan, yang resmi dan yang tak resmi. Yang resmi hanya satu stanza, tapi panjang. Yang tidak resmi terdiri dari 6 stanza, masing-masing 7 baris pendek. *Indonesia Raya* termasuk lagu kebangsaan yang memang sangat panjang (seperti juga India, Honduras, dan umumnya negara-negara Amerika Latin). Jepanglah satu-satunya negara yang lagu kebangsaannya sangat pendek: satu stanza dan hanya empat baris pendek.

Perlu ditekankan di sini bahwa masalahnya memang bukan sekedar hafal-menghafal lirik lagu, seperti anak kecil, melainkan bagaimana sikap kita terhadap lagu kebangsaan sebagai simbol identitas bangsa.

Pengalaman pribadi saya menunjukkan bahwa, terutama orang-orang Eropa, Jepang, Amerika Latin, dan lain-lain – tentu tidak semua orang – jika mereka sedang jalan-jalan, atau

duduk di restoran, lantas suatu saat terdengar di radio lagu kebangsaan negerinya, mereka lalu mengambil sikap, diam, serius dan khidmat. Bahkan ada yang semula duduk, lantas berdiri. Bagaimana dengan kita, terutama sekarang? Cuek, acuh tak acuh!

Sekali lagi, semuanya itu barangkali memang tidak penting. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana kita memahami secara mendalam dan menghayati tiga stanza itu. Jika dicermati, ternyata lirik lagu *Indonesia Raya* itu dari stanza-I sampai dengan stanza-III itu bukanlah sekedar rekaan-rekaan sajak agar enak didengar, melainkan mengandung alur filosofi yang berkesinambungan. Kunci untuk memahami hal ini bisa dilihat dari lirik baris 4, 5, dan 6 dari setiap stanza.

Dalam stanza-I (yaitu satu-satunya stanza yang biasa kita nyanyikan), di baris ke-4, liriknya berbunyi: "Marilah kita berseru, Indonesia bersatu". Lalu baris ke-6: "Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya". Ini dapat diartikan bahwa stanza-I itu mencerminkan bahwa kita sedang membentuk sebuah bangsa. Kita baru berseru, agar bangkit dan bersatu.

Jika baris ke-4 dan ke-6 dari stanza-I itu ditarik sejajar ke stanza-II, liriknya tak lagi berbunyi "berseru", melainkan (baris ke-4): "Marilah kita mendo'a, Indonesia bahagia". Ini cermin bahwa kita juga memakai landasan moral. Manusia berusaha, Tuhan yang menentukan. Mudah-mudahan, doa itu terkabul. Karena itu, baris ke-6: "sadarlah hatinya, sadarlah budinya!"

Setelah kita berhasil membentuk sebuah bangsa, dan kemudian mendoa, maka mulailah kita bersikap realistis. Ini tercermin dalam stanza-III di baris ke-4. Tak lagi "berseru" dan "mendoa", melainkan "Marilah kita berjanji, Indonesia Abadi". Agar dapat melaksanakan janji tersebut, maka dalam baris ke-5 bunyi liriknya: "Selamatkan tanahnya, selamatkan rakyatnya, pulauanya, lautnya, semuanya!" Baris ke-6: "Majulah negerinya, majulah pandunya, untuk Indonesia Raya". Pandu adalah penunjuk jalan. Artinya kepemimpinan.

Jadi, dalam stanza-III itulah terkandung amanat perjuangan kemerdekaan: "menyelamatkan semuanya". Rakyatnya, tanahnya (yang di dalamnya tentu saja sudah terkandung hutan, tambang, sungai, air, dan sebagainya), pulauanya, lautnya, semua harus diselamatkan.

Sayang, karena kita tidak pernah menyanyikan stanza-II dan III, maka barangkali kita memang tidak pernah merasa "berjanji" untuk menyelamatkan semua itu. Yang terjadi kemudian adalah:

*"Babatlah hutannya, kuraslah minyaknya,
tambangnya, lautnya, semuanya
Untuk penguasa dan para majikannya!"*

Agaknya, kita memang harus mulai lagi "berseru", agar sadar, untuk mengemban amanat Ibu Indonesia kita!

Tulisan ini pernah dimuat di blog Sajogyo Institute dan diterbitkan ulang di buku ini atas izin penulis.

Potongan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009

BAB V LAGU KEBANGSAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 58

- (1) Lagu Kebangsaan adalah Indonesia Raya yang digubah oleh Wage Rudolf Supratman.
- (2) Lagu Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Bagian Kedua Penggunaan Lagu Kebangsaan

Pasal 59

- (1) Lagu Kebangsaan wajib diperdengarkan dan/atau dinyanyikan:
 - a. untuk menghormati Presiden dan/atau Wakil Presiden;
 - b. untuk menghormati Bendera Negara pada waktu pengibaran atau penurunan Bendera Negara yang diadakan dalam upacara;
 - c. dalam acara resmi yang diselenggarakan oleh pemerintah;
 - d. dalam acara pembukaan sidang paripurna

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah;

e. untuk menghormati kepala negara atau kepala pemerintahan negara sahabat dalam kunjungan resmi;

f. dalam acara atau kegiatan olahraga internasional; dan

g. dalam acara ataupun kompetisi ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni internasional yang diselenggarakan di Indonesia.

(2) Lagu Kebangsaan dapat diperdengarkan dan/atau dinyanyikan:

a. sebagai pernyataan rasa kebangsaan;

b. dalam rangkaian program pendidikan dan pengajaran;

c. dalam acara resmi lainnya yang diselenggarakan oleh organisasi, partai politik, dan kelompok masyarakat lain; dan/atau

d. dalam acara ataupun kompetisi ilmu pengetahuan, teknologi dan seni internasional.

Bagian Ketiga

Tata Cara Penggunaan Lagu Kebangsaan

Pasal 60

(1) Lagu Kebangsaan dapat dinyanyikan dengan diiringi alat musik, tanpa diiringi alat musik, ataupun diperdengarkan secara instrumental.

(2) Lagu Kebangsaan yang diiringi alat musik, dinyanyikan lengkap satu strofe, dengan satu kali ulangan pada refrein.

(3) Lagu Kebangsaan yang tidak diiringi alat musik, dinyanyikan lengkap satu stanza pertama, dengan satu kali ulangan pada bait ketiga stanza pertama.

Pasal 61

Apabila Lagu Kebangsaan dinyanyikan lengkap tiga stanza, bait ketiga pada stanza kedua dan stanza ketiga dinyanyikan ulang satu kali.

Pasal 62

Setiap orang yang hadir pada saat Lagu Kebangsaan diperdengarkan dan/atau dinyanyikan, wajib berdiri tegak dengan sikap hormat.

Pasal 63

(1) Dalam hal Presiden atau Wakil Presiden Republik Indonesia menerima kunjungan kepala negara atau kepala pemerintahan negara lain, lagu kebangsaan negara lain diperdengarkan lebih dahulu, selanjutnya Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

(2) Dalam hal Presiden Republik Indonesia menerima duta besar negara lain dalam upacara penyerahan surat kepercayaan, lagu kebangsaan negara lain diperdengarkan pada saat duta besar

negara lain tiba, dan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diperdengarkan pada saat duta besar negara lain akan meninggalkan istana.

Bagian Keempat Larangan

Pasal 64

Setiap orang dilarang:

- a. mengubah Lagu Kebangsaan dengan nada, irama, kata-kata, dan gubahan lain dengan maksud untuk menghina atau merendahkan kehormatan Lagu Kebangsaan;
- b. memperdengarkan, menyanyikan, ataupun menyebarkan hasil ubahan Lagu Kebangsaan dengan maksud untuk tujuan komersial; atau
- c. menggunakan Lagu Kebangsaan untuk iklan dengan maksud untuk tujuan komersial.

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 70

Setiap orang yang mengubah Lagu Kebangsaan dengan nada, irama, kata-kata, dan gubahan lain dengan maksud untuk menghina atau merendahkan kehormatan Lagu Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 71

(1) Setiap orang yang dengan sengaja memperdengarkan, menyanyikan, ataupun menyebarkan hasil ubahan Lagu Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(2) Ketentuan ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi setiap orang yang dengan sengaja menggunakan Lagu Kebangsaan untuk iklan komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c.



Upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda di halaman Gedung DPR, 28 Oktober 1958. (Sumber: Perpusnas)

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1958

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Lagu Kebangsaan Republik Indonesia, selanjutnya disebut "Lagu Kebangsaan", ialah lagu Indonesia Raya.
- (2) Lagu Kebangsaan tersebut dan kata-katanya ialah seperti tertera pada lampiran-lampiran Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 2

- (1) Pada kesempatan-kesempatan di mana diperdengarkan Lagu Kebangsaan dengan alat-alat musik, maka lagu itu dibunyikan lengkap satu kali, yaitu satu strofe dengan dua kali ulangan.
- (2) Jika pada kesempatan-kesempatan Lagu Kebangsaan dinyanyikan, maka lagu itu dinyanyikan lengkap satu bait, yaitu bait pertama dengan dua kali ulangan.
- (3) Jika dalam hal tersebut pada ayat 2 di atas, Lagu Kebangsaan dinyanyikan seluruhnya, yaitu tiga bait, maka sesudah bait yang pertama dan sesudah bait yang kedua dinyanyikan ulangan satu kali dan sesudah bait penghabisan dinyanyikan ulangan satu kali dan sesudah bait penghabisan dinyanyikan ulangan dua kali.

BAB II PENGUNAAN LAGU KEBANGSAAN

Pasal 3

Lagu Kebangsaan digunakan sesuai dengan kedudukannya sebagai Lagu Kebangsaan Republik Indonesia.

Pasal 4

(1) Lagu Kebangsaan diperdengarkan/dinyanyikan:

- a) Untuk menghormati Kepala Negara / Wakil Kepala Negara.
- b) Pada waktu penaikan / penurunan Bendera Kebangsaan yang diadakan dalam upacara, untuk menghormati Bendera itu.
- c) Untuk menghormati negara asing.

(2) Lagu Kebangsaan dapat pula diperdengarkan / dinyanyikan:

- a) Sebagai pernyataan perasaan nasional.
- b) Dalam rangkaian pendidikan dan pengajaran

Pasal 5

Dilarang:

- a) Menggunakan Lagu Kebangsaan untuk reklame dalam bentuk apapun juga.
- b) Menggunakan bagian-bagian daripada Lagu Kebangsaan dalam gubahan yang tidak sesuai dengan kedudukan Lagu Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan.

BAB III
PENGUNAAN LAGU KEBANGSAAN BERSAMA-
SAMA DENGAN LAGU KEBANGSAAN
ASING

Pasal 6

(1) Apabila untuk Kepala Negara / Kepala Pemerintah negara asing diperdengarkan lagu kebangsaan negara asing, maka lagu kebangsaan negara asing itu diperdengarkan lebih dahulu, kemudian diperdengarkan "Indonesia Raya".

(2) Pada waktu Presiden menerima Duta Besar Negara Asing dalam upacara penyerahan surat kepercayaan, maka lagu kebangsaan negara asing itu diperdengarkan pada saat Duta Besar itu tiba, sedang "Indonesia Raya" diperdengarkan pada saat Duta Besar itu akan meninggalkan Istana.

(3) Jika pada suatu pertemuan, yang diadakan oleh kepala perwakilan negara asing dan dikunjungi oleh Kepala Negara/Wakil Kepala Negara Republik Indonesia, diperdengarkan lagu kebangsaan pada kedatangan / keberangkatannya, maka "Indonesia Raya" diperdengarkan lebih dahulu daripada lagu kebangsaan negara asing.

(4) Jika pada suatu pertemuan diadakan toast untuk menghormat kepala sesuatu negara, maka sesudah toast itu dengan segera diperdengarkan lagu kebangsaan negara itu.

BAB IV PENGUNAAN LAGU KEBANGSAAN NEGARA ASING SENDIRI

Pasal 7

(1) Dalam suatu pertemuan yang bersifat tertutup, lagu kebangsaan negara asing boleh diperdengarkan / dinyanyikan sendiri tidak dengan izin seperti dimaksud dalam ayat 2.

(2) Dalam suatu Pertemuan yang dapat dilihat oleh umum, lagu kebangsaan negara asing tidak boleh diperdengarkan / dinyanyikan sendiri jika tidak didapat izin lebih dahulu dari Kepala Daerah setempat yang tertinggi.

(3) Dalam suatu pertemuan, baik umum maupun tertutup, yang dihadiri oleh pejabat-pejabat negara Republik Indonesia yang diundang sebagai pejabat negara, lagu kebangsaan negara asing tidak boleh diperdengarkan sendiri, melainkan harus diperdengarkan pula lagu kebangsaan "Indonesia Raya".

BAB V TATA TERTIB DALAM PENGGUNAAN LAGU KEBANGSAAN

Pasal 8

(1) Lagu Kebangsaan tidak boleh diperdengarkan / dinyanyikan pada waktu dan tempat menurut sesuka-sukanya sendiri.

(2) Lagu Kebangsaan tidak boleh diperdengarkan dan

/ atau dinyanyikan dengan nada-nada, irama, iringan, kata-kata dan gubahan-gubahan lain daripada yang tertera dalam lampiran-lampiran Peraturan ini.

Pasal 9

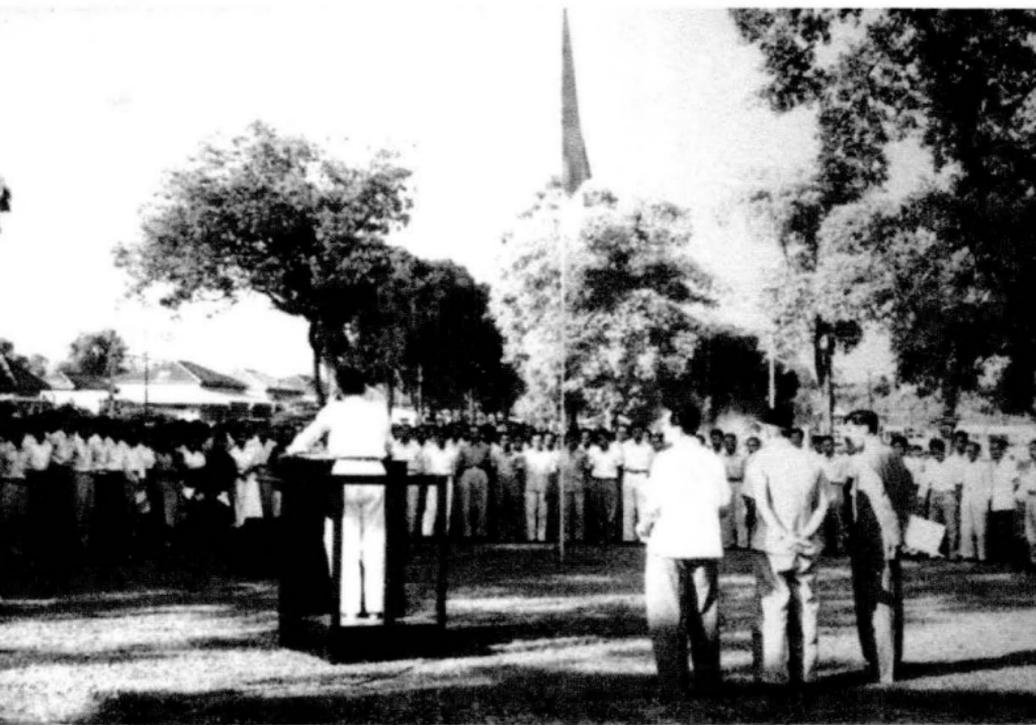
Pada waktu Lagu Kebangsaan diperdengarkan / dinyanyikan pada kesempatan-kesempatan yang dimaksud dalam peraturan ini, maka orang yang hadir berdiri tegak di tempat masing-masing. Mereka yang berpakaian seragam dari sesuatu organisasi memberi hormat dengan cara yang telah ditetapkan untuk organisasi itu. Mereka yang tidak berpakaian seragam, memberi hormat dengan meluruskan lengan ke bawah dan melekatkan tapak tangan dengan jari-jari rapat pada paha, sedang penutup kepala harus dibuka, kecuali kopiah, ikat kepala sorban dan kudung atau topi wanita yang dipakai menurut agama atau adat-kebiasaan.

BAB VI ATURAN HUKUMAN

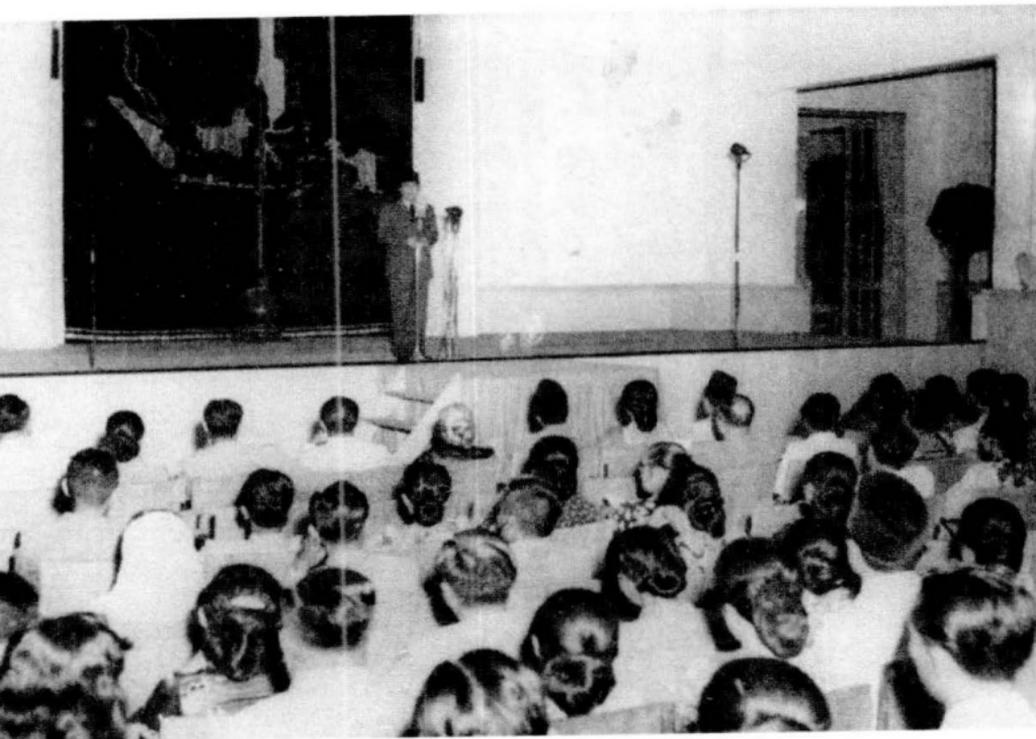
Pasal 10

(1) Barangsiapa melanggar ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 5, pasal 7 ayat 2 dan ayat 3, dan pasal 8 Peraturan ini, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau dengan denda sebanyak-banyaknya lima ratus rupiah.

(2) Perbuatan-perbuatan tersebut dalam ayat 1, dipandang sebagai pelanggaran.



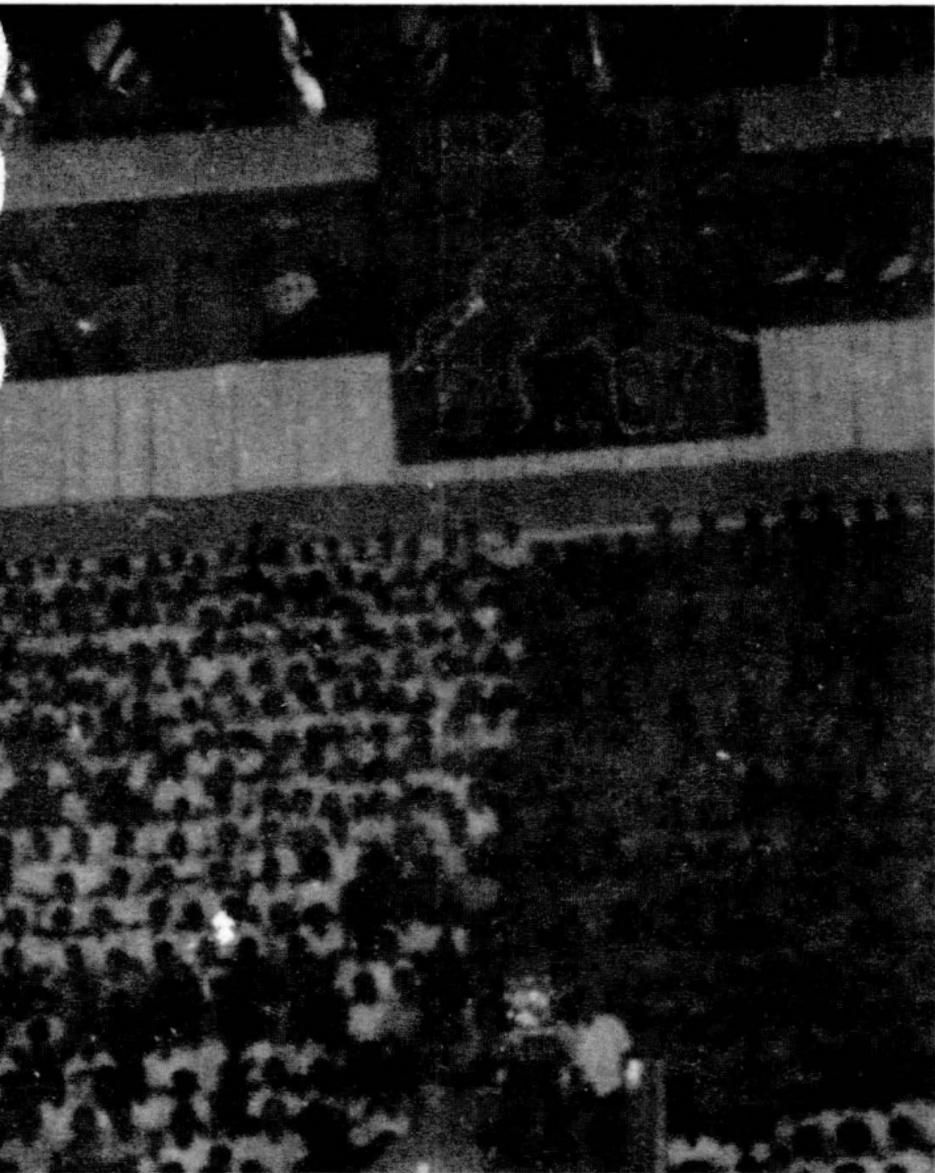
Upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda di halaman Gedung DPR, 28 Oktober 1958. (Sumber: Perpusnas)





Kiri dan Kanan: Upacara peringatan Tri Windu [24 tahun] lagu *Indonesia Raya* di Istana Merdeka, 28 Oktober 1952.
[Sumber: Perpusnas]





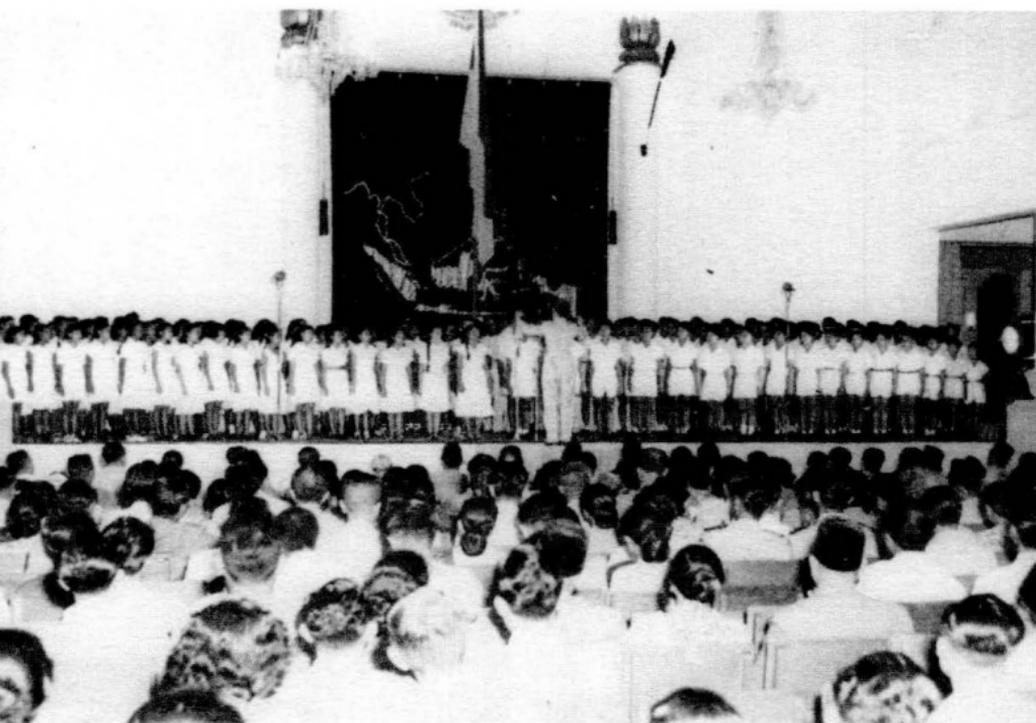
Presiden Soekarno berpidato pada upacara peringatan Sumpah Pemuda di Gelora Bung Karno Senayan, 28 Oktober 1963.
(Sumber: Perpusnas)

Tentang Gita Bahana Nusantara

Edi Irawan

Secara etimologis, Gita Bahana Nusantara (selanjutnya disingkat GBN) terdiri atas tiga kata yang pemaknaannya berakar dari budaya Indonesia. Kata gita yang berasal dari bahasa Sanskerta berarti nyanyian atau lagu. Adapun bahana adalah gema, bunyi (suara) riuh rendah, atau luar biasa, sedangkan Nusantara merujuk pada sebutan bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Maka yang dimaksud Gita Bahana Nusantara adalah nyanyian yang menggema di seluruh wilayah kepulauan Indonesia.

Gagasan pembentukan GBN sudah mengemuka sejak 2001 dari Presiden Megawati Soekarno Putri (2001-2004). Megawati menyampaikan gagasannya kepada Surya Yuga (Direktur Kesenian waktu itu) untuk membentuk paduan suara dan orkestra nasional. Ide dasarnya adalah melibatkan seluruh generasi muda dari seluruh Indonesia, meremajakan pemain orkes yang sudah ada, dan menunjukkan kepribadian dalam kebudayaan. Selanjutnya Surya Yuga menyampaikan hal tersebut kepada I Gede Ardika (Menteri Kebudayaan dan Pariwisata 2001-2004). Selanjutnya I Gede Ardika menegaskan bahwa peserta adalah gabungan generasi muda Indonesia, agar tumbuh rasa nasionalisme (bangga akan persatuan dan kesatuan) dan memiliki jiwa



Upacara peringatan Tri Windu (24 tahun) lagu *Indonesia Raya* di Istana Merdeka, 28 Oktober 1952. (Sumber: Perpusnas)

patriotisme (semangat kejuangan). Oleh karena itu, pada 2002 gagasan itu dimatangkan oleh Dr. Sri Hastanto (Direktur Jenderal Nilai Budaya, Seni dan Film) untuk mewujudkan suatu wadah paduan suara dan orkestra yang khas Indonesia, serta merumuskan teknis pelaksanaan GBN. Teknis pelaksanaan GBN diawali oleh audisi peserta, baik paduan suara maupun orkestra, pemusatan latihan, gelar perdana, dan pergelaran pada pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam Sidang Pleno DPR/MPR 2003. Puncaknya adalah pada peringatan Detik-Detik Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta pada 2003 juga. Sejak 2003 GBN mengawali debutnya berkumandang hingga saat ini.

Lahirnya gagasan GBN dilatarbelakangi tujuan untuk (a) menguatkan jati diri dan karakter bangsa, (b) untuk menumbuhkan rasa kebangsaan, menghormati perbedaan, dan memupuk rasa kebersamaan di kalangan generasi muda, dan (c) membentuk paduan suara dan orkestra nasional yang tangguh. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wadah tersebut untuk menyalurkan bakat dan potensi kreativitas generasi muda di bidang seni musik, yang pada akhirnya tumbuh rasa nasionalisme dan patriotisme, menghargai keberagaman, dan menguatnya jati diri dan karakter bangsa.

Dari 2003 sampai 2011, GBN difasilitasi oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Di awal pelaksanaannya terasa berat, karena

melibatkan seluruh provinsi di Indonesia yang tidak sama pemahaman akan pentingnya pembangunan karakter bangsa, khususnya di kalangan generasi muda. Namun berkat dorongan semangat dari Ibu Megawati sebagai penggagas awal, tim kerja Kembudpar mampu mewujudkan pelaksanaan GBN dengan baik. Pada perkembangan selanjutnya, Bapak Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono memberikan perhatian dan dukungan penuh, sehingga kegiatan GBN dapat dilaksanakan lebih baik dalam mekanisme pelaksanaannya.

Pada Oktober 2011, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata berganti nomenklatur menjadi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, sedangkan "kebudayaan" berintegrasi kembali dengan "pendidikan" menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sejak itu, pelaksanaan GBN difasilitasi oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dari 2012-2014. Tujuan GBN pun ditambah dengan memasukkan unsur kreativitas dan pemahaman ekonomi kreatif. Penyelenggaraan GBN diharapkan dapat menjadi sarana untuk memotivasi dan memberikan pemahaman kepada generasi muda tentang ekonomi kreatif.

Pada Maret 2015, Direktur Jenderal Ekonomi Kreatif Berbasis Seni Budaya, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi menyerahkan penyelenggaraan Gita Bahana Nusantara kepada Direktur Jenderal Kebudayaan, yang selanjutnya menugaskan

Direktur Kesenian untuk melaksanakan kegiatan GBN pada 2015 tersebut. Walaupun waktu yang sangat mendesak, panitia pelaksana Direktorat Kesenian mampu menyelenggarakan GBN tahun 2015 secara baik berkat dukungan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Anies Baswedan dan Direktur Jenderal Kebudayaan, Bapak Kacung Maridjan. Pada 2016, Direktorat Kesenian kembali menyelenggarakan GBN secara sukses dengan pejabat baru di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu Bapak Muhadjir Effendy sebagai menteri dan Bapak Hilmar Farid sebagai Direktur Jenderal Kebudayaan.

Penyelenggaraan GBN oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sejak 2015, merupakan kembalinya anak hilang ke habitat aslinya. Tujuan awal dibentuknya GBN adalah membangun karakter dan jatidiri bangsa, khususnya di kalangan generasi muda. Hal ini sejalan dengan visi dan misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan khususnya yang berkaitan dengan pendidikan karakter yang gencar dikumandangkan. Nilai-nilai pendidikan karakter antara lain: religius, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, dan integritas juga merupakan nilai-nilai yang diinternalisasikan kepada setiap peserta Gita Bahana Nusantara.

Gita Bahana Nusantara merupakan gabungan vokalis dan pemusik terbaik dari seluruh Indonesia yang perekrutan



Upacara peringatan Empat Windu Sumpah Pemuda di Istana Negara, 28 Oktober 1960. (Sumber: Perpusnas)

anggotanya dilaksanakan melalui audisi yang diselenggarakan di seluruh provinsi di Indonesia. Mereka adalah putra-putri terbaik yang berusia 15 – 25 tahun, memenuhi berbagai persyaratan baik umum maupun teknik musikalitas. Audisi paduan suara memilih peserta yang akan mewakili provinsinya dengan jenis suara sopran, alto, tenor dan bass. Sedangkan audisi orkestra dilaksanakan di sekolah-sekolah musik dan perguruan tinggi dengan menitikberatkan pada kemampuan teknis bermusik dan kemampuan prima vista (membaca notasi pada saat itu juga). Secara spesifik dalam proses audisi, para juri memilih calon peserta dengan kriteria: (a) memiliki bakat musikalitas, (b) menguasai teknik prima vista (c), memiliki karakter suara dan artikulasi yang prima, (d) memiliki prestasi di sekolah, dan (e) mengenal dan memahami budaya daerah asalnya. Penyelenggaraan audisi di daerah dilaksanakan oleh pemerintah provinsi melalui dinas yang terkait dengan pembinaan kebudayaan di daerah masing-masing.

Setelah proses audisi selesai, para peserta yang terpilih untuk mewakili provinsi masing-masing, dipanggil untuk masuk pemusatan latihan selama kurang lebih tiga minggu. Selama karantina tersebut, selain jadwal latihan musikalitas, peserta diberi materi pembekalan bela negara, pembinaan karakter, kunjungan belajar, dan rekreasi ke berbagai obyek yang mendukung pembentukan karakter bagi peserta.

Setelah melalui karantina dan latihan yang intensif, awal dari pelaksanaan tugas utama GBN adalah Gelar Perdana di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan untuk menguji kesiapan dan kelayakan tampil. Pergelaran Utama GBN adalah pada Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di Sidang DPR-DPD RI di Gedung DPR/MPR RI, dan puncaknya Pada Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta. Lagu-lagu yang ditampilkan adalah lagu-lagu nasional dan lagu-lagu daerah yang digubah dalam bentuk medley. Ciri khas Gita Bahana Nusantara adalah susunan orkestra yang memasukkan unsur-unsur musik etnik pada instrumennya, seperti sasando, sampek, kendang, kecapi, dan gondang batak, serta aransemen lagu-lagu daerah yang mewakili wilayah-wilayah di Indonesia, dengan judul: Nyanyian Negeriku, Nyanyian Nusantara, Tembang Nusantara, dan Tembang Indonesia. Dalam penampilannya peserta paduan suara Gita Bahana Nusantara mengenakan pakaian daerah masing-masing, sehingga mencerminkan kebhinekaan bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai latar belakang suku bangsa, bahasa, dan etnis.





Kiri dan Kanan: Upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda di Stadion IKADA, 28 Oktober 1961. (Sumber: Perpusnas)

Penanggung Jawab

Direktur Jenderal Kebudayaan
Hilmar Farid

Pengarah

Direktur Sejarah
Triana Wulandari

Kontributor

Kasubdit Sejarah Nasional
Amurwani Dwi Lestariningsih

Kasubdit Internalisasi Nilai Sejarah
Edi Suwardi

Koordinator

Mirwan Andan

Penulis

Martin Suryajaya
Gunawan Wiradi
Edi Irawan

Editor

M. Fauzi

Periset Foto

Barak Azis Malinggi

Perwajahan dan Penata Letak

Sutradani Lebu
George Michael

Percetakan

Panel Barus (Serpico)



<http://kebudayaan.kemdikbud.go.id>